



DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO KOTA PASURUAN





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Sitematika Dokumen.....	7
BAB II VISI MISI DAERAH	8
2.1 Visi RPJMD	8
2.2 Misi RPJMD	11
2.3 Tujuan dan Sasaran.....	18
BAB III IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALIS RISIKO	21
3.1 Definisi Identifikasi Risiko	21
3.2 Identifikasi Risiko.....	25
BAB IV PETA RISIKO.....	50
4.1 Peta Risiko	50
BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	78
BAB VI PENUTUP	91



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi Misi RPJMD Kota Pasuruan.....	11
Tabel 3.1 Skala Kemungkinan Risiko	23
Tabel 3.2 Skala Dampak Risiko	23
Tabel 3.3 Skala Nilai Risiko	24
Tabel 3.4 Skala Risiko	25
Tabel 3.5 Analisis Risiko Misi 1	26
Tabel 3.6 Analisis Risiko Misi 2	29
Tabel 3.7 Analisis Risiko Misi 3	33
Tabel 3.8 Analisis Risiko Misi 4	44
Tabel 4.1 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Tujuan)	50
Tabel 4.2 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Sasaran).....	52
Tabel 4.3 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Tujuan)	54
Tabel 4.4 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Sasaran).....	56
Tabel 4.5 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 1)	58
Tabel 4.6 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 1).....	60
Tabel 4.7 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2).....	62
Tabel 4.8 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 3).....	64
Tabel 4.9 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 4).....	66
Tabel 4.10 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 2)	67
Tabel 4.11 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran).....	69
Tabel 4.12 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Tujuan)	71
Tabel 4.13 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran).....	73
Tabel 4.14 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran).....	75
Tabel 5.1 Rencana Tindak Pengendalian Misi I	80
Tabel 5.2 Rencana Tindak Pengendalian Misi II	82
Tabel 5.3 Rencana Tindak Pengendalian Misi III	83
Tabel 5.4 Rencana Tindak Pengendalian Misi IV	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Tujuan).....	51
Gambar 4.2 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Sasaran)	53
Gambar 4.3 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Tujuan).....	55
Gambar 4.4 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Sasaran)	57
Gambar 4.5 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 1).....	59
Gambar 4.6 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 1)	61
Gambar 4.7 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2)	63
Gambar 4.8 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 3)	65
Gambar 4.9 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 4)	66
Gambar 4.10 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 2).....	68
Gambar 4.11 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2).....	70
Gambar 4.12 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Tujuan).....	72
Gambar 4.13 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran).....	74
Gambar 4.14 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran).....	76



BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah). Penyelenggaraan SPIP meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap dan terintegrasi pada semua tingkatan kegiatan di Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP. Pedoman tersebut meliputi satu Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP dan 25 Pedoman Teknis Penyelenggaraan unsur-unsur SPIP yang dua buah di antaranya adalah Pedoman Teknis untuk unsur Penilaian Risiko.

Pengendalian risiko merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi, atau mengelola risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas dan operasionalnya. Risiko dapat berdampak negatif pada tujuan organisasi, baik itu keuangan, operasional, reputasi, atau kepatuhan. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk mengendalikan dan memperbaiki proses pengelolaan keuangan dan operasional. SPIP bertujuan



untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pemerintahan.

Pengendalian risiko dan SPIP berkaitan erat karena SPIP merupakan salah satu komponen penting dari pengendalian risiko di sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, risiko yang dihadapi oleh lembaga pemerintah mencakup risiko keuangan, korupsi, penyimpangan kebijakan, atau pelanggaran hukum. SPIP hadir sebagai respon terhadap tantangan pengelolaan risiko dalam pemerintahan. Lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan efektif dan efisien, serta memastikan penggunaan sumber daya publik yang tepat dan akuntabel. SPIP memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengendalikan risiko, melalui langkah-langkah seperti identifikasi risiko, penilaian risiko, perencanaan pengendalian, pelaksanaan pengendalian, dan pemantauan.

Melalui SPIP, lembaga pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, mengevaluasi tingkat risiko yang terkait, serta merancang dan melaksanakan pengendalian yang sesuai untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. SPIP juga mencakup aspek pengawasan dan pemantauan yang memastikan efektivitas dari pengendalian yang telah diimplementasikan.

Lebih lanjut, ada tiga komponen untuk menilai penyelenggaraan tingkat maturitas SPIP, yakni; pertama kualitas penetapan tujuan, kedua penyelenggaraan struktur dan proses, ketiga pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Kualitas penetapan tujuan ditinjau dari kepastian tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis. Struktur dan proses ditinjau dari 5 (lima) unsur pengendalian yang



kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) sub unsur pengendalian, dari masing-masing sub unsur tersebut memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Pencapaian tujuan organisasi ditinjau dari pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya peningkatan SPIP, Manajemen Risiko dapat di definisikan proses yang bertujuan untuk Proses yang bertujuan untuk membantu organisasi memahami, mengevaluasi dan mengambil tindakan atas semua risiko mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Oleh sebab itu dengan adanya manajemen Risiko yang baik maka instansi pemerintah dapat mengetahui potensi-potensi hambatan dan juga faktor kegagalan dalam pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Manajemen Risiko terdiri atas penilaian Risiko kegiatan pengendalian informasi dan komunikasi serta monitoring dan evaluasi pengendalian Risiko dengan demikian ketika Kota Pasuruan melaksanakan manajemen Risiko Kota Pasuruan dapat memetakan potensi Risiko yang akan di hadapi kedepannya.

Penyusunan manajemen risiko dimaksud untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) perangkat daerah.



Penilaian risiko atas tujuan strategis pemerintah daerah dilaksanakan bersama dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah tersusunnya RPJMD. Lalu penilaian risiko atas tujuan strategis perangkat daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra perangkat daerah atau setelah tersusunnya Renstra Perangkat daerah. Proses penyusunan manajemen risiko meliputi Penetapan konteks, identifikasi risiko, dan analisa risiko. Dalam konteks penilaian risiko yang ada di kota pasuruan menggunakan dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisa risiko-risiko yang ada. Terdapat 3 kriteria dalam penilaian risiko yaitu: skala dampak risiko, skala kemungkinan risiko, dan skala tingkat risiko. Ketiga penilaian risiko tersebut digunakan dalam memetakan risiko-risiko yang ada baik tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat tujuan di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. Terdapat tahapan dalam pelaksanaan identifikasi risiko yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko
2. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Konteks pengelolaan risiko pada pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis Perangkat daerah, dan tujuan tingkat kegiatan perangkat daerah. Pengelolaan risiko pemerintah daerah



bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, pengelolaan strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh kepala daerah serta wakilnya, lalu dibantu oleh kepala perangkat daerah selaku perwakilan tingkat pemerintah daerah dibawah koordinasi sekretariat daerah.

Pengelolaan risiko strategis pada tingkat perangkat daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra perangkat daerah. Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah bersama jajaran strukturalnya baik tingkat Eselon II, III dan IV.

Selanjutnya terdapat pula pengelolaan risiko operasional perangkat daerah yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

Harapan setelah mengidentifikasi maupun memetakan risiko-risiko baik di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat perangkat daerah adalah agar dapat membantu inspektorat untuk mengevaluasi dan memprioritaskan risiko yang diidentifikasi. Dalam proses ini, risiko diberi bobot dan diurutkan berdasarkan tingkat dampaknya terhadap organisasi. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengelola risiko yang paling signifikan. Serta mengalokasi anggaran sebagai upaya perbaikan kedepannya.



1.2 Tujuan

Pelaksanaan Manajemen Risiko ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan SPIP di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Pasuruan. Penggunaan Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai:

1. Bahan acuan yang aplikatif dan integratif bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan penilaian risiko;
2. Menghasilkan informasi tentang daftar, status dan peta risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya; dan
3. Bahan acuan dalam rangka pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan penilaian risiko di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan.

1.3 Dasar Hukum

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
- 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- 4 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 5 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;



- 6 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 7 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 – 2026;
- 8 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintahan Kota Pasuruan.

1.4 Sitematika Dokumen

Pedoman Pengelolaan Risiko Kota Pasuruan ini disajikan secara terstruktur melalui sistematika dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sitematika Dokumen

BAB II VISI MISI DAERAH

- 2.1 Visi Misi RPJMD
- 2.2 Tujuan dan Sasaran

BAB III IDENTIFIKASI RISIKO

BAB IV ANALISIS DAN PETA RISIKO

BAB V RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

BAB VI PENUTUP



BAB II VISI DAN MISI DAERAH





BAB II

VISI MISI DAERAH

2.1 Visi RPJMD

Visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah dalam membangun sebuah daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan visi idealnya dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal pada masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 disusun tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4. Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

PASURUAN KOTA MADINAH

“Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”

Poin-poin Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 dibedakan menjadi tiga (3) yang dijabarkan sebagai berikut :

1. **Maju Ekonominya.** Kota Pasuruan Maju yang dimaksud adalah cita-cita terbesar yang bergerak kedepan untuk menjadi kota yang baik, yang terdepan disegala aspek meliputi aspek ekonomi, aspek pelayanan publik, aspek pelayanan dasar dan aspek lainnya. Kota Pasuruan Maju merupakan komitmen atau upaya meningkatkan daya saing Kota Pasuruan dengan kabupaten/kota lain. Optimistis memajukan Kota Pasuruan bukannya tanpa alasan, secara historis Kota Pasuruan menjadi pusat kejayaannya ketika kota tersebut sebagai ibu kota karesidenan. Kota Pasurun menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bahkan wilayah Pasuruan sudah mulai



ramai sejak sebelum dibangunnya Jalan Raya Pos Daendels pada tahun 1808-1811. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Maju Ekonominya :

- a. Membangun Sentra UMKM dan Industri Olahan untuk Membuka Lapangan Kerja;
- b. Menciptakan Daya Tarik Kunjungan Wisata berupa Wisata Religi, Budaya, Adat Istiadat, Heritage, dan Event Kreatif dengan Komunitas Lokal;
- c. Membangun Sistem Perizinan yang Berorientasi Pada Kemudahan Berusaha dan Investasi;
- d. Menciptakan Budaya Kerja Birokrasi yang Adaptif, Lincah dan Bersih.

2. **Indah Kotanya.** Kota Pasuruan Indah berfokus terhadap menjadikan Kota Pasuruan indah tata letak dan landscapenya. Kota Pasuruan yang berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur merupakan modal utama menata Kota Pasuruan menjadi lebih estetik. Banyaknya Kawasan heritage, menjadikan daya tambah pembangunan perkotaan Kota Pasuruan. Merevitalisasi dan menyentuh kembali bangunan heritage dan kemudian memanfaatkannya sebagai wisata heritage dapat mengungkit keindahan Kota Pasuruan. Selain itu kiblata pembangunan wilayah pesisir dengan konsep *water front city* akan menjadikan pembangunan dan penataan wilayah pesisir menjadi satu *spot open space* yang dapat dijadikan rujukan destinasi wisata baik masyarakat lokal maupun internasional. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Indah Kotanya :

- a. Penataan Kawasan Permukiman yang Terhubung dengan Aspek Perekonomian dan Layanan Dasar;



- b. Menata Ruang Publik yang Hijau dan Nyaman yang Ramah Anak, Lansia dan Difabel.
3. **Harmonis Warganya.** Kota Pasuruan Harmonis dapat menjadikan Kota sebagai wilayah yang nyaman untuk ditinggali bagi seluruh lapisan masyarakat. Kunci utama dalam menciptakan Kota Pasuruan yang harmonis adalah dengan mengoptimalkan keberagaman tersebut sebagai modal sosial yang kuat dan merawatnya sehingga kehidupan di Kota Pasuruan tetap berlangsung aman, damai dan harmonis. Menjadikan Kota Pasuruan sebagai kota yang harmonis merupakan daya dukung utama yang mampu untuk memberikan support terhadap kemajuan dan keindahan kota. Dengan masyarakat yang harmonis secara tidak langsung akan dapat dengan guyub rukun membangun Kota Pasuruan lebih baik lagi. Berikut merupakan detail uraian fokus dari Visi Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 poin Harmonis Warganya :
 - a. Memperkuat Modal Sosial yang Berkarakter dan Harmonisasi Antar Umat Beragama dan Etnis;
 - b. Memastikan Semua Lapisan Masyarakat Mudah dalam Mengakses Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan dari COVID-19;
 - c. Mendekatkan Layanan Kepada Masyarakat dengan Digitalisasi Layanan.

Berikut merupakan keterkaitan pokok-pokok visi dengan misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang sekaligus menggambarkan keterkaitan visi dan misi Kota Pasuruan.



Tabel 2.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi Misi RPJMD Kota Pasuruan

Visi RPJMD 2021-2026	Pokok Visi	Misi	
Pasuruan Kota Madinah “Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmonis Warganya”	Maju Ekonominya	Misi I : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan	
	Indah Kotanya	Misi II : Membangun Kota Yang Indah dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan	
	Harmonis Warganya		Misi III : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan dan Kesehatan Yang Merata
			Misi IV : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif

Sumber: RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

2.2 Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



- MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan.
- MISI 2** Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.
- MISI 3** Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.
- MISI 4** Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :

- MISI 1** Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan.

Kota Pasuruan memiliki potensi lokal yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu sektor penting ekonomi lokal yang ada adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Berkembangnya sektor perdagangan Besar dan Eceran di Kota Pasuruan harus mampu mendorong multiplier effect yang luas, diantaranya adalah: mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan nilai manfaat ekonomi. Disinilah tugas pemerintah daerah dalam mengayomi aktivitas ekonomi melalui pengaturan alokasi sumberdaya secara lebih efisien dan merata. Berikut beberapa poin penting untuk percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi sekaligus menjadi fokus pembangunan ekonomi Kota Pasuruan kedepan, meliputi:



1. Bagaimana tenaga kerja lokal memiliki skill (keahlian) yang relevan dengan kebutuhan industri khususnya dalam menyerap kebutuhan *high-skilled labour* (tenaga kerja dengan keterampilan tinggi).
2. Bagaimana industri yang beroperasi memiliki keterkaitan dalam rantai nilai pasokan yang melibatkan industri-industri lokal kecil dan menengah (UMKM) yang ada di wilayah Kota Pasuruan.
3. Bagaimana infrastruktur di Kota Pasuruan mampu menekan efisiensi dalam konteks logistik sehingga menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan.
4. Bagaimana industri yang ada mampu menyerap tenaga kerja lokal di Kota Pasuruan dan berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan (mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan).
5. Bagaimana industri yang ada minim eksternalitas negatif khususnya terkait dampak atas polusi lingkungan.

Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan; dan
2. Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi.

MISI 2 Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan.

Untuk menjadikan Kota Pasuruan indah dan nyaman yang didukung dengan konektivitas infrastruktur ekonomi dan sosial berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di Kota Pasuruan pada periode kedepan memiliki 2 fokus yakni pembangunan infrastruktur dasar yang memberikan support terhadap sektor ekonomi industri dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Untuk yang pertama yakni adalah



pembangunan infrastruktur yang fokus terhadap infrastruktur ekonomi industri didorong untuk menunjang produktivitas industri yang ada di Kota Pasuruan. Pembangunan infrastruktur ekonomi industry harus pula didukung dengan sistem logistic yang efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan tidak hanya membangun infrastruktur fisiknya saja melainkan juga membangun jaringan infrastruktur pendukung, seperti mendekatkan sektor industri kearah digitalisasi.

Dewasa ini, pemanfaatan perkembangan teknologi digital pada suatu usaha bertujuan untuk memudahkan value chain bisnis mulai dari produksi hingga sampai di tangan konsumen menjadi hal penting untuk diterapkan seperti dalam konteks logistik. Dengan adanya digitalisasi tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, customer satisfaction, dan juga sebagai bentuk excellent service yang diberikan oleh perusahaan baik kepada internal perusahaan itu sendiri maupun kepada konsumen nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dan menjalin mitra dengan platform digital, yang mana dewasa ini banyak bermunculan start-up yang bergerak dalam business digital platform. Misalnya dengan Gapura Digital, Qasir (*point of sales*), Dana (*digital payment*), TaniHub, dan lain sebagainya.

Industri dan bisnis lokal yang diarahkan menuju digital, perlu juga didukung dengan adanya branding produk untuk memberikan pembeda bagi produk yang dipasarkan dengan produk lain, apalagi untuk masuk kedalam persaingan global, maka diperlukan adanya branding yang baik sehingga dapat menciptakan adanya citra bagi produk. Konsumen juga lebih mudah mengenali produk yang diproduksi atau dijual oleh industri yang ada di Kota Pasuruan. Dari mana memulai branding produk ini? Branding produk dapat diciptakan dari wilayah asal produk, jenis produk, bahan baku produk, ataupun aspek lain



yang berkaitan dengan produk yang dijual. Kami optimis branding produk ini akan melahirkan kesan dan citra positif.

Pembangunan infrastruktur kedua adalah pembangunan infrastruktur perkotaan yang mendukung nilai-nilai estetika. Fokus pembangunan infrastruktur kedua ini adalah merevitalisasi kawasan-kawasan tertentu di Kota Pasuruan khususnya wilayah pesisir dan kawasan heritage. Tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk menguatkan kembali identitas Kota Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan semakin dikenal. Baik secara langsung, maupun tidak langsung, pada akhirnya juga memperkuat pariwisata dan meningkatkan perekonomian. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-2 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Merata; dan
2. Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MISI 3 Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata.

Bentuk hadirnya Negara dalam pembangunan salah satunya terlihat nyata dalam wajah layanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Layanan dasar yang harus dihadirkan adalah bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap kemudahan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta layanan dasar lainnya seperti kependudukan dan perijinan. Pendidikan dan kesehatan merupakan hak fundamental yang harus diperoleh masyarakat dari pemerintah daerah. Founding Father kita, Presiden Soekarno, salah satu tokoh yang penulis kagumi pemikirannya, pernah menggagas sebuah konsep besar yang disebut dengan “Pembangunan Semesta”, yaitu pembangunan yang diorientasikan sebesar-besarnya untuk



membangun manusianya, atau dikenal dengan term “*People Centre Development*”.

Ide besar dalam mencapai pendidikan yang berkualitas adalah melalui konsep Pendidikan Berkualitas berbasis *Civil Society*. Berikut merupakan strategi pelaksanaannya: a) Menjamin komitmen politik dari Kepala Daerah terhadap pendidikan, melalui alokasi anggaran sektor pendidikan 20% dari APBD Kota Pasuruan; b) Pemerataan dan distribusi anggaran pendidikan melalui APBD; c) pendidikan untuk semua warga masyarakat. Paradigma baru pendidikan di Kota Pasuruan harus diarahkan kepada terbentuknya *civil society*; dan d) pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal.

Sedangkan fokus pada urusan kesehatan terfokus dalam 3 gagasan penting pembangunan sektor Kesehatan yang meliputi a) meningkatkan supply dalam hal ini ketersediaan fasilitas kesehatan mencakup peningkatan kualitas dan mutu infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, jenis/kualitas pelayanan kesehatan serta keamanan; b) Mengurangi barrier (hambatan), salah satu hambatan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional adalah permasalahan terkait proses administrasi kesehatan, berbelit-belitnya alur pelayanan jaminan kesehatan seakan menjadi masalah klasik yang berdampak kepada menurunnya kepuasan masyarakat Kota Pasuruan terhadap layanan kesehatan tersebut; dan c) meningkatkan demand (permintaan/pemanfaatan) pemanfaatan jaminan Kesehatan.

Selain itu kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis melalui pembangunan modal sosial merupakan poin penting dalam pembangunan Misi ke 3. Pembangunan modal sosial di Kota Pasuruan fokus terhadap menciptakan jalinan ikatan sosial budaya baik antara masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah yang dibangun sedemikian rupa untuk menciptakan tatanan sosial masyarakat yang Maju, Aman,



Damai, Indah dan Harmonis (MADINAH). Dengan modal sosial yang kuat meningkatkan semangat gotong-royong, meningkatkan produktivitas, mengurangi kriminalitas, serta dapat mendorong setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan perempuan dan daya beli masyarakat merupakan poin penting lain yang menjadi fokus pada Misi ke 3 Kota Pasuruan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-3 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 :

1. Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan;
2. Daya Beli Masyarakat;
3. Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan;
4. Harmonisasi Kehidupan Masyarakat; dan
5. Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan.

MISI 4 Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Misi utama dari perbaikan birokrasi di Kota Pasuruan ke depan adalah dengan “**Mewujudkan Birokrasi Kekinian**”. Bekal utama mewujudkan birokrasi yang kekinian adalah kepemimpinan yang patut dijadikan contoh, pemanfaatan teknologi informasi dan perubahan mental aparatur. Mental aparatur dalam birokrasi kekinian hendaknya memiliki karakter yang kreatif dan tidak sekedar menjalankan aktivitas rutin pemerintahan. Selaras dengan semangat pemerintah pusat reformasi birokrasi hendaknya difokuskan pada 8 area perubahan. Berikut merupakan perencanaan terintegratif dalam langkah mencapai Misi Ke-4 RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026:

1. Manajemen Pemerintahan Adaptif dan Profesional; dan
2. Digitalisasi Pelayanan Publik.



2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kota Pasuruan secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah *measurable* dan *tangible*.

Measurable dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) di level Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada label Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni **“Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal, didukung dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi
 - 2) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencapai Misi II yakni **“Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur**



Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan”, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup, didukung dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Merata
 - 2) Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mencapai Misi III yakni **“Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia, didukung oleh sasaran:
 - 1) Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan
 - 3) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
 - 4) Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan
- b. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis, didukung oleh sasaran:
 - 1) Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
 - 2) Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama
 - 3) Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni **“Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif”**, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi, didukung dengan sasaran:



- 1) Membangun Kapasitas Manejemen Pemerintah yang Adaptif dan Profesional
- 2) Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik.



BAB III IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALISIS RISIKO





BAB III

IDENTIFIKASI RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

3.1 Definisi Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi, menggali, dan mengumpulkan informasi tentang kemungkinan terjadinya peristiwa atau kondisi yang dapat memiliki dampak negatif atau merugikan terhadap tujuan, proyek, atau organisasi. Identifikasi risiko melibatkan mengidentifikasi dan mendokumentasikan secara sistematis potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu konteks tertentu.

Dalam proses identifikasi risiko, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Ini melibatkan pengidentifikasian berbagai jenis risiko yang mungkin timbul, seperti risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko lingkungan, atau risiko kepatuhan. Identifikasi risiko juga mencakup mengidentifikasi penyebab risiko, kerentanan yang ada, serta dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terwujud.

Identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam manajemen risiko secara menyeluruh, yang diikuti oleh penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan risiko, dan pemantauan serta pengendalian risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk menginformasikan pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan atau mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi.

Prosedur manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi konteks seluruh proses risiko akan diterapkan. Hal ini juga mencakup penentuan proses risiko akan berlaku pada tingkat strategis atau operasional, pada tingkat organisasi atau satuan



kerja, atau pada tingkat kegiatan. Tahap ini juga melibatkan penetapan kriteria risiko yang terdiri dari frekuensi/kemungkinan, dampak, dan tingkat risiko yang akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian risiko. Kriteria-kriteria tersebut harus dirumuskan dengan sederhana, tetapi tetap presisi, komprehensif, dan sesuai dengan proses bisnis organisasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Unit kerja yang menjadi unit pemilik risiko

Unit kerja yang menjadi unit pemilik risiko dibagi menjadi tingkat Pemerintah Kota dan Tingkat Perangkat Daerah. Identifikasi risiko dilakukan terlebih dahulu pada sasaran dan misi milik Kota Pasuruan, setelah proses identifikasi di tingkat Pemerintah Kota maka selanjutnya adalah proses identifikasi di tingkat Perangkat Daerah. Proses identifikasi risiko di tingkat Perangkat Daerah dilakukan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan milik Perangkat Daerah.

b. Sasaran yang akan dikelola risikonya

Sasaran risiko yang akan dikelola adalah risiko yang berasal baik dari faktor eksternal maupun faktor internal organisasi. Dalam konteks ini, identifikasi risiko dilakukan menyeluruh terhadap hubungan antara Pemerintah Kota Pasuruan dan lingkungan eksternal.

c. Waktu risiko yang akan dikelola

Waktu yang ditentukan untuk risiko yang dikelola adalah risiko di program, kegiatan, dan sub kegiatan di sepanjang Tahun 2023.

d. Kriteria untuk analisis risiko dan evaluasi risiko

Tabel 3.2 Skala Kemungkinan Risiko

Kriteria Kemungkinan	
Hampir Tidak Terjadi (1)	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode
Jarang Terjadi (2)	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 10 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d. 10% dari volume transaksi dalam 1 periode
Kadang Terjadi (3)	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d. 18 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode
Sering Terjadi (4)	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d. 26 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi (5)	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun)
	Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

Tabel 3.3 Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Daerah	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organsiasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian ≤ Rp 10 Juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi ≤ 3 dalam periode tertentu	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 50 juta	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% sampai dengan 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari sampai dengan 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d. 15 kali dalam satu periode



Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Daerah	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organsiasi	Tuntutan Hukum
Moderat (3)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% sampai dengan 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari sampai dengan 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 s.d. 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% sampai dengan 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari sampai dengan 30 hari	Jumlah tuntutan hukum 30 s.d. 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian lebih dari Rp 500 juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja di bawah 25%	Pelayanan tertunda di lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

Tabel 3.4 Skala Nilai Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	12	16	20	24	25
	4	Sering Terjadi	8	14	19	22	23
	3	Kadang Terjadi	4	10	15	18	21
	2	Jarang Terjadi	2	6	9	13	17
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	7	11

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022



Tabel 3.5 Skala Risiko

Skala Risiko	Level Risiko	Nilai Risiko
5	Sangat Tinggi	25
		24
		23
4	Tinggi	22
		21
		20
		19
		18
3	Sedang	17
		16
		15
		14
		13
		12
		11
		10
2	Rendah	9
		8
		7
		6
		5
1	Sangat Rendah	4
		3
		2
		1

Sumber: Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 89 Tahun 2022

3.2 Identifikasi Risiko

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap kejadian-kejadian yang berpotensi mengancam pencapaian tujuan atau sasaran. Tahap ini memiliki peran yang sangat penting, karena jika terdapat risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini, risiko tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut dan mungkin tidak akan ditangani.

Berdasarkan hasil identifikasi yang didapatkan melalui teknik kajian terhadap dokumen-dokumen, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) berikut adalah risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi:



Tabel 3.6 Analisis Risiko Misi 1

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M1T11	Tidak sesuai nya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan <i>high-skilled labour</i>	3,00			3,00			1,8	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,00
M1T12	Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas	4,00				4,00		1,8	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	14,00
M1T13	Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktivitas industri	4,00				4,00		1,6	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	14,00
M1T14	Rendahnya tingkat pendapatan daerah	4,00				4,00		1,8	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	14,00
M1T1S11	Keterbatasan akses terhadap	3,00			3,00			1,6	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	10,00



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	modal													
M1T1S12	Angka TPT yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir	3,00			3,00			1,8	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	10,00
M1T1S13	Ketidaksesuaian data kemiskinan yang ada di lapangan	4,00				4,00		2,2	4,00	2,00	3,00	1,00	1,00	14,00
M1T1S21	Potensi pendapatan yang masih belum dikelola maksimal	3,00			3,00			2,4	5,00	2,00	3,00	1,00	1,00	14,00
M1T1S22	Kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal	3,00			3,00			1,8	2,00	2,00	3,00	1,00	1,00	10,00

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Penilaian risiko pada misi 1 (satu) yaitu Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan dilakukan dengan menganalisis risiko pada tujuan dan sasaran yang mendukung misi terkait. Pernyataan risiko pada tujuan Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal yaitu Tidak sesuai nya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan high-skilled labour, Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas, Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktivitas industri, dan Rendahnya tingkat pendapatan daerah. Pernyataan risiko dari hasil analisis sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Ekonomi adalah Keterbatasan akses terhadap modal, Angka TPT yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan Ketidaksesuaian data kemiskinan yang ada di lapangan. Sedangkan pernyataan risiko pada sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penunjang Pendapatan Asli Daerah adalah Potensi pendapatan yang masih belum dikelola maksimal dan Kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal.



Tabel 3.7 Analisis Risiko Misi 2

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M2T11	Belum optimalnya peningkatan konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas	3,00			V			2,60	4,00	2,00	3,00	3,00	1,00	15,00
M2T12	Masih minimnya peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi	2,00		V				2,40	3,00	2,00	3,00	3,00	1,00	6,00
M2T13	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman	5,00					V	2,60	4,00	2,00	3,00	3,00	1,00	21,00



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M2T14	Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD	5,00					V	2,60	4,00	2,00	3,00	3,00	1,00	21,00
M2T15	Terjadinya bencana yang belum termitigasi dengan baik	2,00		V				2,00	4,00	2,00	1,00	1,00	2,00	6,00
M2T1S11	Masih terjadi kekurangan investasi di sektor pembangunan infrastruktur	5					V	2,80	4	3	3	3	1	20
M2T1S12	Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	3			V			2,00	2	3	2	2	1	10



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M2T1S21	Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	4				V		2,40	3	2	3	3	1	19
M2T1S22	Penurunan komponen lingkungan pada perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana	1	V					2,20	3	2	3	2	1	3

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Pengelolaan risiko pada misi 2 (dua) “Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan” didasarkan pada pelaksanaan analisis risiko di tingkat tujuan dan sasaran. Dimana pada misi 2(dua) terdapat 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Hasil analisis risiko pada tujuan “Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup” yaitu Peningkatan konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas, Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi, Penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman, Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD, dan Mewujudkan Suasana Kehidupan yang Aman, Tentram, Tertib yang berbasis pada nilai agama dan budaya serta Penguatan Mitigasi Bencana.

Pada tingkat sasaran 1 (satu) “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Merata” didapatkan pernyataan risiko Masih terjadi kekurangan investasi di sektor pembangunan infrastruktur dan Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Sedangkan pada sasaran 2 (dua) “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup” yaitu Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan Penurunan komponen lingkungan pada perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana.



Tabel 3.8 Analisis Risiko Misi 3

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M3T11	Adanya ketimpangan pendidikan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya yang menyebabkan dampak serius pada kualitas sumber daya manusia dan belum meratanya kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan	3			v			1,6	0	2	3	2	1	10



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M3T12	Daya saing ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Pasuruan masih rendah	4						1,8	0	2	3	3	1	14
M3T13	Kinerja sektor unggulan mengalami stagnasi sehingga pelaku usaha di sektor unggulan didominasi oleh usaha mikro dan kecil	5						1,2	0	1	2	3	0	12
M3T14	Masih ada beberapa usaha mikro dan kecil masih berpola pikir konservatif dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar	5						1	0	1	4	0	0	12
M3T15	Adanya	3						1	0	2	3	0	0	4



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	kesenjangan dalam pembangunan manusia													
M3T16	Belum optimalnya kualitas kontrol pelayanan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat (humanity)	5						1,6	0	2	4	2	0	16
M3T17	Belum optimalnya pelaksanaan kontrol manajemen Rumah Sakit	5						1,6	0	2	4	2	0	16
M3T18	Belum optimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri atau digitalisasi	1						1,2	0	2	3	1	0	1
M3T1S11	Masih ada masyarakat yang belum selesai menempuh pendidikan dalam	5						0,4	0	0	2	0	0	12



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	jenjang tertentu untuk melanjutkan pendidikan													
M3T1S12	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren)	2						0,8	0	0	4	0	0	2
M3T1S13	Masih banyaknya guru senior yang belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran	5						1,4	0	2	4	1	0	12
M3T1S14	Masih banyaknya guru honorer yang pendapatannya lebih rendah daripada buruh	5						2,4	0	2	5	5	0	16
M3T1S15	Belum meratanya pendaftaran pengajar ke setiap sekolah karena lebih memilih sekolah favorit	4						0,8	0	2	2	0	0	8



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M3T1S16	Penurunan mutu/akreditasi dari sekolah karena adanya zonasi	5						0,6	0	1	2	0	0	12
M3T1S21	Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta neonatal	5						1,2	0	1	3	2	0	12
M3T1S22	Masih tingginya Angka Kematian Ibu	3						0,8			3	1	0	4
M3T1S23	Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat	5						1,6	0	2	4	2	0	16
M3T1S24	Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah	5						1,2	0	2	3	1	0	12
M3T1S31	Adanya perubahan harga yang mengalami	4						1,4	0	3	3	1	0	8



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	kenaikan													
M3T1S32	Adanya pengaruh inflasi	4						1,2	0	2	3	1	0	8
M3T1S33	Adanya penurunan nilai tukar mata uang	4						1,2	0	2	3	1	0	8
M3T1S34	Adanya peningkatan pajak	2						1,2	0	2	3	1	0	2
M3T1S35	Minimnya lapangan pekerjaan masyarakat	4						1,2	0	2	3	1	0	8
M3T1S36	Adanya kredit yang banyak beredar di masyarakat	5						1,2	0	2	3	1	0	12
M3T1S37	Adanya kenaikan suku bunga	5						1,2	0	2	3	1	0	12
M3T1S38	Tidak terpenuhinya produk yang diinginkan masyarakat	5						1,2	0	2	3	1	0	12
M3T1S41	Masih rendahnya pembangunan berkeadilan	4						1	0	0	2	1	2	8



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	antara laki-laki dan perempuan													
M3T1S42	Pemahaman pembangunan gender di masyarakat masih rendah	5						1	0	0	2	1	2	12
M.3.T.2.1	Adanya pengikisan etika dan budi pekerti	3,00			v			1,00						5,00
M.3.T.2.2	Pelestarian lingkungan masih belum optimal	5,00				v		2,00						5,00
M.3.T.2.3	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan negara yang rendah	5,00				v		3,00						5,00
M.3.T.2.S.1.1	Banyaknya ruang publik yang berpotensi menjadi tempat PEKAT (Penyakit Masyarakat)	3,00			v			2,00						3,00
M.3.T.2.S.1.2	Tidak tersedianya Shelter atau Rumah Singgah	5,00				v		3,00						5,00



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M.3.T.2.S. 2.1	Potensi Hilangnya modal sosial dalam lingkungan Masyarakat	3,00			v			1,00						3,00
M.3.T.2.S. 3.1	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam rehabilitasi sosial;	2		v				3						2
M.3.T.2.S. 3.2	Potensi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkotika;	4				v		3						4
M.3.T.2.S. 3.3	Belum optimalnya upaya pemenuhan Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak	2		v				2						2
M.3.T.2.S. 3.4	Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas	4						2						4



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5 Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan													

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Pengelolaan risiko pada misi 3 (tiga) “Memantabkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata” didasarkan pada pelaksanaan analisis risiko di tingkat tujuan dan sasaran. Dimana pada misi 3 (tiga) terdapat 3 (dua) tujuan, dimana tujuan 1 (satu) memiliki 4 (empat) sasaran. Pernyataan risiko untuk tujuan 1 (satu) “Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia” adalah Adanya ketimpangan pendidikan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya yang menyebabkan dampak serius pada kualitas sumber daya manusia dan belum meratanya kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan, Daya saing ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Pasuruan masih rendah, Kinerja sektor unggulan mengalami stagnasi sehingga pelaku usaha di sektor unggulan didominasi oleh usaha mikro dan kecil, Masih ada beberapa usaha mikro dan kecil masih berpola pikir konservatif dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar.

Kemudian untuk pernyataan risiko pada sasaran 2 (dua) “Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan” yaitu Masih ada masyarakat yang belum selesai menempuh pendidikan dalam jenjang tertentu untuk melanjutkan pendidikan, Belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren), Masih banyaknya guru senior yang belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, Masih banyaknya guru honorer yang pendapatannya lebih rendah daripada buruh, Belum meratanya pendaftaran pengajar ke setiap sekolah karena lebih memilih sekolah favorit, Penurunan mutu/akreditasi dari sekolah karena adanya zonasi. Sasaran 3 (tiga) “Terwujudnya Toleransi Antar Umat Beragama” yaitu Masih



tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta neonatal, Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat, Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah, Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat, Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah. Sasaran 4 (empat) “Terwujudnya Solidaritas Sosial Masyarakat” Adanya perubahan harga yang mengalami kenaikan, Adanya pengaruh inflasi, Adanya penurunan nilai tukar mata uang, Adanya peningkatan pajak, Minimnya lapangan pekerjaan masyarakat, Adanya kredit yang banyak beredar di masyarakat, Adanya kenaikan suku bunga, Tidak terpenuhinya produk yang diinginkan masyarakat, Masih rendahnya pembangunan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, dan Pemahaman pembangunan gender di masyarakat masih rendah.



Tabel 3.9 Analisis Risiko Misi 4

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M.4.T.1.1	Perlunya <i>maintenace</i> kebijakan (perencanaan, monev dan kekurangan anggaran) atau adanya perubahan kebijakan	4,00				v		5,00	5					23,00
M.4.T.1.2	Faktor pendukung yang kurang memadai (sarana dan prasarana)	4,00				v		4,00	5	3	3	3	2	22,00
M.4.T.1.3	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan mengacu													
M.4.T.1.S.1.1	Perlunya pendidikan non formal untuk meningkatkan Kompetensi	4,00						4,00						22



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M.4.T.1.S.1.2	Monev dan evaluasi yang tidak berjalan	5,00						3,00						20,00
M.4.T.1.S.1.3	Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah	3,00						4,00						18
M.4.T.1.S.1.4	Kebijakan kepegawaian pemerintah (Rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi) yang tidak tepat sasaran	3,00						3,00						15
M.4.T.1.S.1.5	Perlunya penatausahaan keuangan daerah	3,00						3,00						15
M.4.T.1.S.1.6	Adanya temuan berulang dalam tingkat OPD	3,00						3,00						15
M.4.T.1.S.1.7	Temuan yang materiil (temuan yang mempengaruhi)	1,00						5,00						11



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	keseluruhan opini BPK													
M.4.T.1.S.1.8	Komitmen pimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja OPD	1,00						5,00						11,00
M.4.T.1.S.1.9	Kurangnya pendidikan formal ASN	2,00						3,00						9
M.4.T.1.S.1.10	Evaluasi kebijakan tidak berjalan	1,00						3,00						5
M.4.T.1.S.1.11	Masih banyak ASN yang kurang peduli terhadap kemajuan teknologi untuk peningkatan kinerja													
M.4.T.1.S.2.1	Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis	4,00				v		2,60	1	1	5	5	1	19



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
	elektronik (SPBE)													
M.4.T.1.S. 2.2	Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (terkait pelayanan prima) dalam teknologi serta anggaran yang tidak disetujui	3,00			v			1,60	1	2	2	2	1	10
M.4.T.1.S. 2.3	Tidak adanya tracing sistem dalam pelayanan dan pengaduan (atas tindak lanjut pengaduan) terkait progres maupun hasil	4,00				v		1,20	1	2	1	1	1	8
M.4.T.1.S. 2.4	Tidak ada evaluasi dari OPD yang tidak bertanggungjawab langsung kepada kementerian	3,00			v			1,20	1	1	2	1	1	4



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Kurang 2 Kali/5 Th	2-10 Kali/5 Th	10-18 Kali/5 Th	18-26 Kali/5 Th	Lebih 26 Kali/5Th	Skor Dampak	Kerugian	Reputasi	Kinerja	Layanan	Hukum	Skala Risiko
1	2	3						4						5
M.4.T.1.S.2.5	Hasil evaluasi IKM tidak ditindaklanjuti	2,00		v				1,40	1	2	2	1	1	2

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Penyataan risiko Tujuan 1 (Satu) “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi” yaitu Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, Faktor pendukung yang kurang memadai (sarana dan prasarana), dan Kurangnya maintenance kebijakan (perencanaan, monev dan kekurangan anggaran) atau adanya perubahan kebijakan. Sasaran 1 (satu) “Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintahan yang Adaptif dan Profesional” yaitu Masih banyak ASN yang kurang peduli terhadap kemajuan teknologi untuk peningkatan kinerja, Monev dan evaluasi yang tidak berjalan, Komitmen pimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja OPD, Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, Perlunya penatausahaan keuangan daerah, Adanya temuan berulang dalam tingkat OPD, Temuan yang materiil (temuan yang mempengaruhi keseluruhan opini BPK), Evaluasi kebijakan tidak berjalan, Kurangnya pendidikan formal ASN, Kebijakan kepegawaian pemerintah (Rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi) yang tidak tepat sasaran, dan Perlunya pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensi.

Sasaran 2 (dua) “Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik” yaitu Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Tidak adanya tracing sistem dalam pelayanan dan pengaduan (atas tindak lanjut pengaduan) terkait progres maupun hasil, Hasil evaluasi IKM tidak ditindaklanjuti, Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (terkait pelayanan prima) dalam teknologi serta anggaran yang tidak disetujui, dan Tidak ada evaluasi dari OPD yang tidak bertanggungjawab langsung kepada kementerian.



BAB IV PETA RISIKO





BAB IV PETA RISIKO

4.1 Peta Risiko

Peta risiko adalah peta yang menunjukkan tingkat risiko terhadap suatu risiko yang mungkin dihadapi dan berdampak pada kinerja pelayanan terhadap masyarakat. Berikut pemetaan peta risiko untuk di Pemerintah Kota Pasuruan:

Tabel 4.10 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Tujuan)

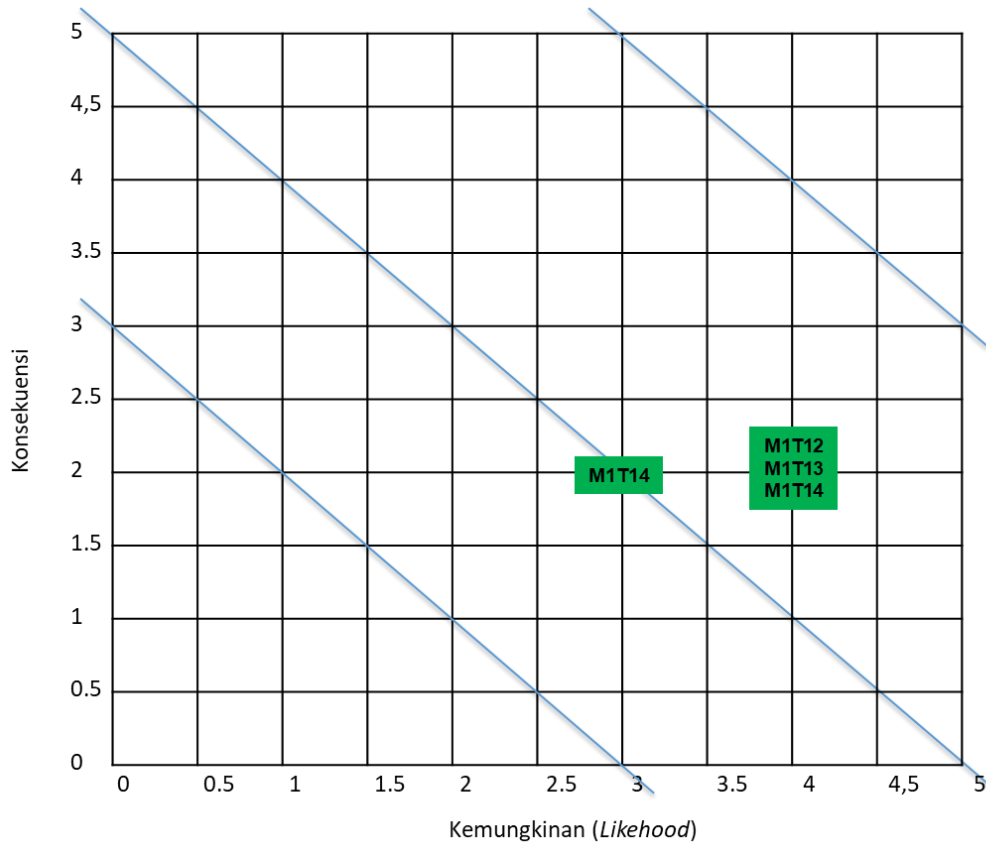
Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M1T11	Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas	4,00	2,00	14,00	Sedang
M1T12	Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktivitas industri	4,00	2,00	14,00	Sedang
M1T13	Rendahnya tingkat pendapatan daerah	4,00	2,00	14,00	Sedang
M1T14	Tidak sesuai nya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan <i>high-skilled labour</i>	3,00	2,00	10,00	Sedang

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada RPJMD Misi 1, tujuan yang mempunyai risiko paling tinggi adalah pernyataan risiko adalah jangkauan distribusi hasil produksi UMKM yang masih terbatas. Risiko tersebut mempunyai kategori sedang. Sedangkan tujuan yang mempunyai risiko paling rendah adalah tujuan dengan pernyataan risiko tidak sesuai nya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang



mempunyai *high-skilled labour*. Risiko tersebut juga mempunyai kategori yang sedang. Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas menjadi risiko yang mempunyai skala risiko paling tinggi, karena jangkauan distribusi hasil produksi UMKM mengalami hambatan.



Gambar 4.1 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Tujuan)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada gambar peta risiko Tujuan 1 (satu) “Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal” terdapat tiga risiko yang memiliki nilai skala risiko tertinggi yaitu 14 diantaranya adalah Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas, Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktivitas industri, Rendahnya tingkat pendapatan daerah. Sedangkan pada nilai 10 dalam skala risiko di tujuan ini adalah Tidak sesuai nya



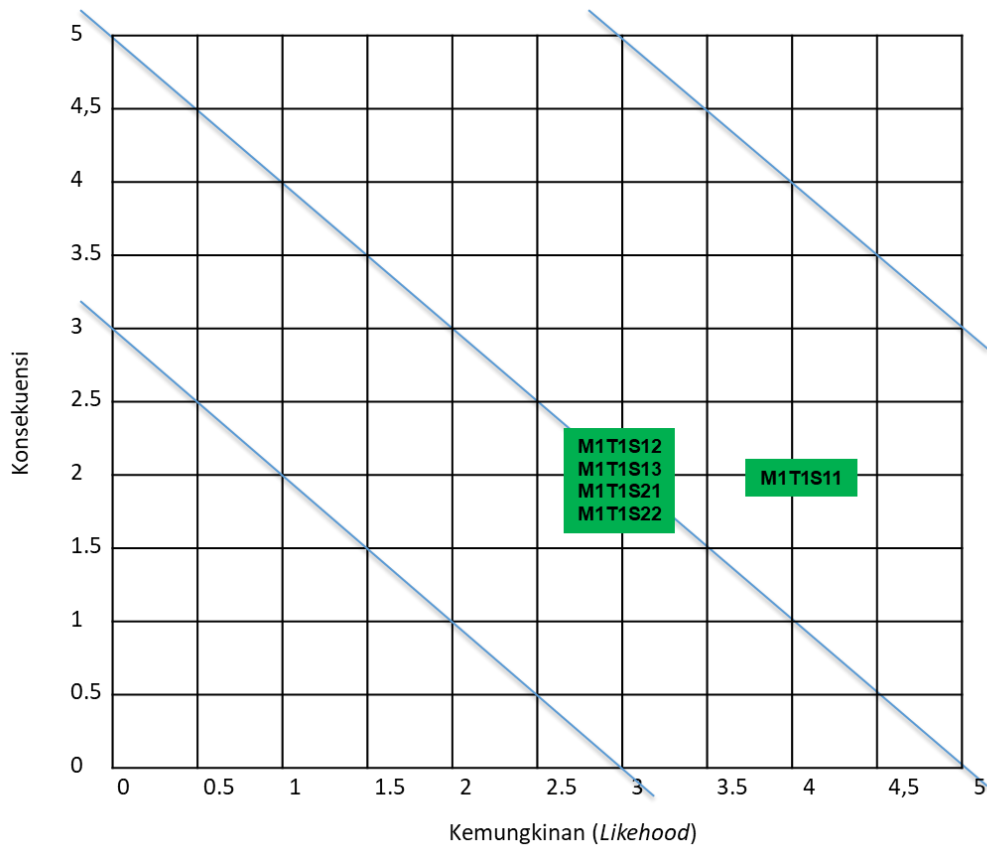
keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan high-skilled labour. Secara keseluruhan risiko pada sasaran ini masih dikategori sedang.

Tabel 4.11 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Sasaran)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M1T1S11	Keterbatasan akses terhadap modal	4,00	2,00	14,00	Sedang
M1T1S12	Angka TPT yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir	3,00	2,00	10,00	Sedang
M1T1S13	Ketidaksesuaian data kemiskinan yang ada di lapangan	3,00	2,00	10,00	Sedang
M1T1S21	Potensi pendapatan yang masih belum dikelola maksimal	4,00	2,00	14,00	Sedang
M1T1S22	Kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal	3,00	2,00	10,00	Sedang

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada RPJMD Misi 1, sasaran yang mempunyai risiko paling tinggi adalah Sasaran ke-1 dengan pernyataan risiko adalah keterbatasan akses terhadap modal. Risiko tersebut mempunyai kategori sedang. Sedangkan sasaran yang mempunyai risiko paling rendah adalah Sasaran ke-2 dengan pernyataan risiko kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Risiko tersebut juga mempunyai kategori yang sedang.



Gambar 4.2 Peta Risiko Misi 1 RPJMD (Sasaran)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Berdasarkan peta risiko sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penunjang Pendapatan Asli Daerah terdapat risiko dengan skala 10 yaitu Angka TPT yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Ketidaksesuaian data kemiskinan yang ada di lapangan, Potensi pendapatan yang masih belum dikelola maksimal, Kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal. Sedangkan terdapat risiko dengan nilai skala 14 yaitu Keterbatasan akses terhadap modal. Secara keseluruhan risiko pada sasaran ini masih dikategori sedang.



Tabel 4.12 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Tujuan)

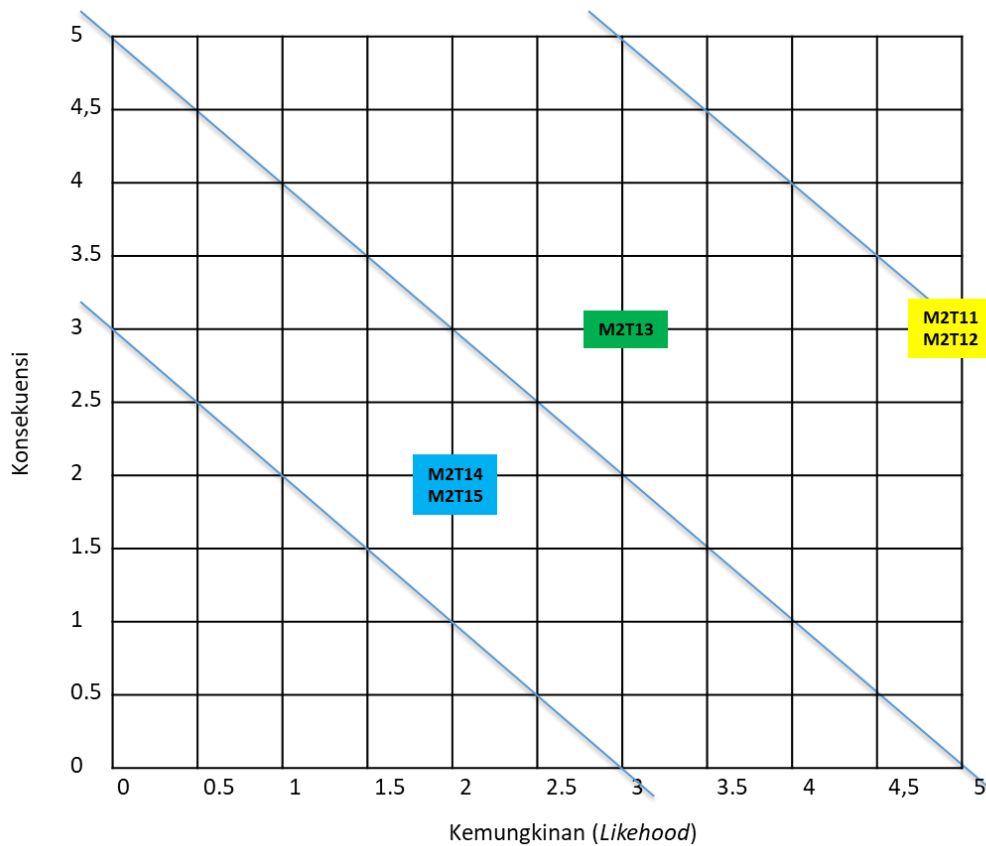
Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M2T11	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M2T12	Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M2T13	Belum optimalnya peningkatan konektifitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas	3,00	3,00	15,00	Sedang
M2T14	Masih minimnya peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi	2,00	2,00	6,00	Rendah
M2T15	Terjadinya bencana yang belum termitigasi dengan baik	2,00	2,00	6,00	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada RPJMD Misi 2, tujuan yang mempunyai risiko paling tinggi adalah Tujuan ke-1 dengan pernyataan risiko adalah Belum optimalnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman. Sedangkan tujuan yang mempunyai risiko paling rendah adalah tujuan



dengan pernyataan risiko terjadinya bencana yang belum termitigasi dengan baik. Risiko tersebut juga mempunyai kategori yang rendah.



Gambar 4.3 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Tujuan)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada penilaian risiko yang tersajikan dalam peta risiko untuk Tujuan “Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki hasil penilaian risiko masuk dalam beberapa kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Risiko dengan nilai skala tinggi yaitu 20 adalah Belum optimalnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman dan Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan upaya alternatif

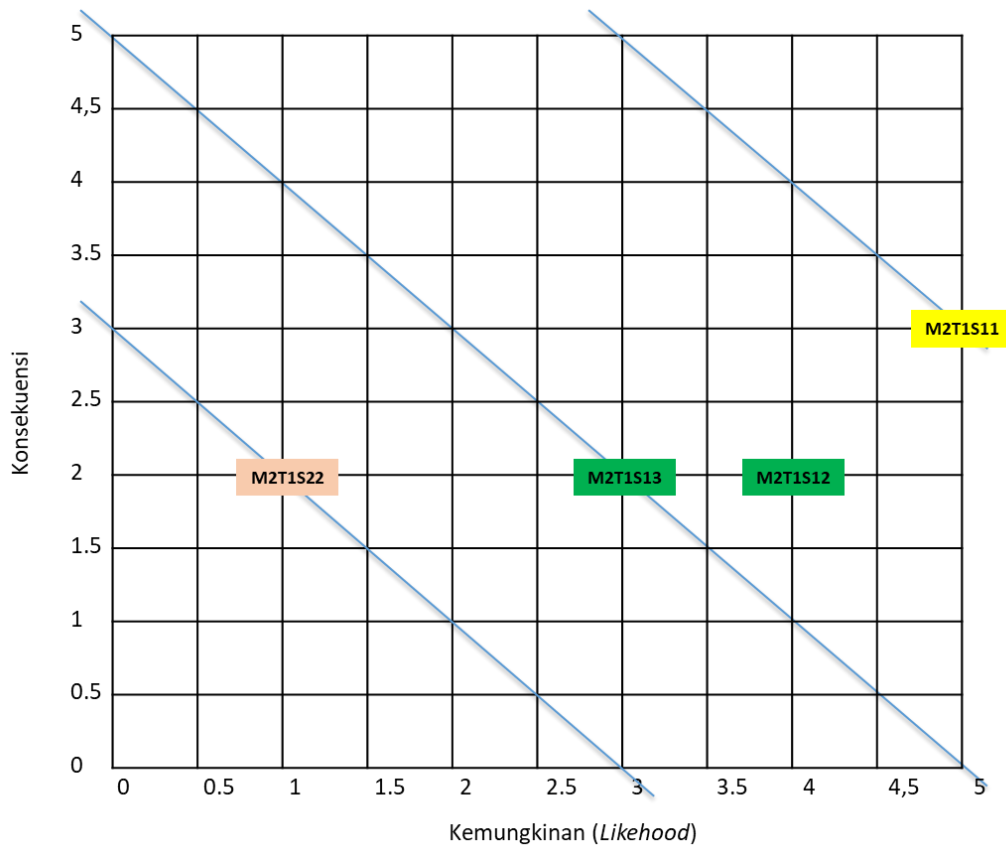


dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD. Sedangkan untuk risiko dengan kategori sedang yaitu 15 adalah Belum optimalnya peningkatan konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas. Dua risiko lain yang masuk dalam kategori rendah yaitu 6 adalah Masih minimnya peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi dan Terjadinya bencana yang belum termitigasi dengan baik

Tabel 4.13 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Sasaran)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M2T1S11	Masih terjadi kekurangan investasi di sektor pembangunan infrastruktur	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M2T1S12	Terjadi perubahan penilaian IKLH, sehingga menyebabkan adanya komponen yang perlu menjadi perhatian	4,00	2,00	14,00	Sedang
M2T1S21	Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan	3,00	2,00	10,00	Sedang
M2T1S22	Penurunan komponen lingkungan pada perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana	1,00	2, ,00	3,00	Sangat Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.4 Peta Risiko Misi 2 RPJMD (Sasaran)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

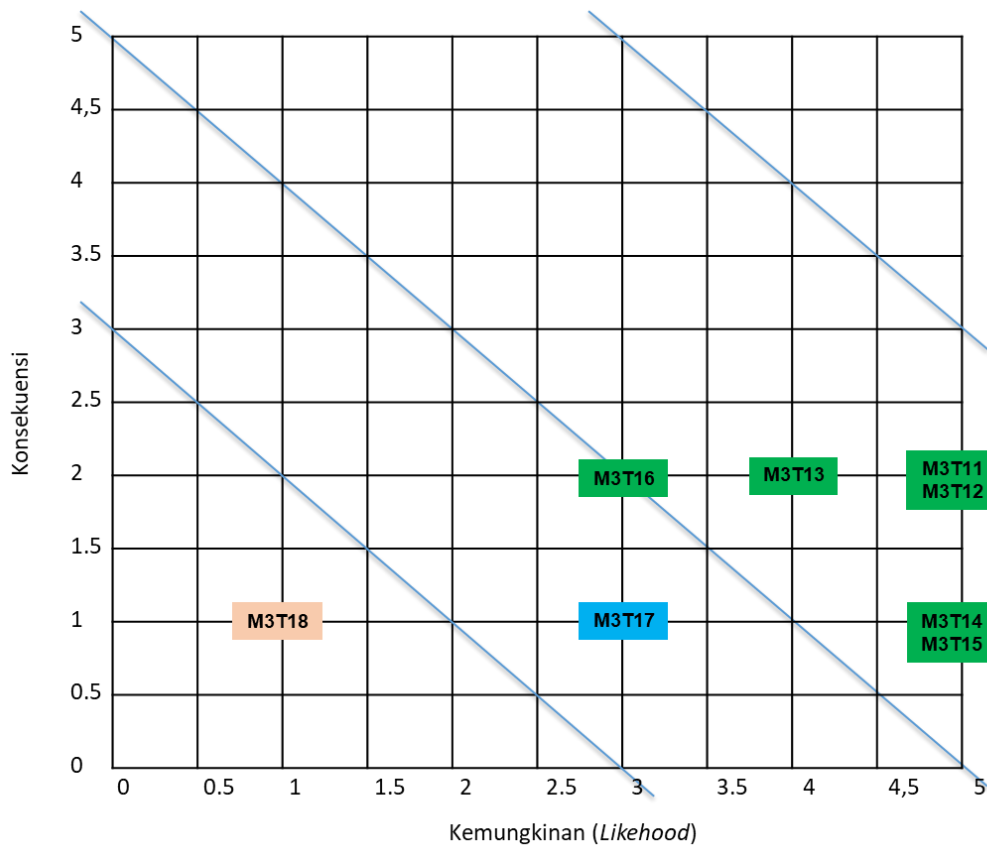
Penilaian risiko pada sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup” misi 2 memiliki hasil dengan kategori tinggi, sedang, dan sangat rendah. Kategori sangat rendah dengan nilai skala risiko 3 yaitu Penurunan komponen lingkungan pada perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana. Kategori sedang dengan nilai 10 adalah Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan kategori sedang dengan nilai risiko 14 yaitu Terjadi perubahan penilaian IKLH, sehingga menyebabkan adanya komponen yang perlu menjadi perhatian. Sedangkan risiko dengan kategori tinggi adalah Masih terjadi kekurangan investasi di sektor pembangunan infrastruktur yang memiliki skala risiko 20.



Tabel 4.14 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 1)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T11	Belum optimalnya kualitas kontrol pelayanan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat (<i>humanity</i>)	5,00	2,00	16,00	Sedang
M3T12	Belum optimalnya pelaksanaan kontrol manajemen Rumah Sakit	5,00	2,00	16,00	Sedang
M3T13	Daya saing ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Pasuruan masih rendah	4,00	2,00	14,00	Sedang
M3T14	Kinerja sektor unggulan mengalami stagnasi sehingga pelaku usaha di sektor unggulan didominasi oleh usaha mikro dan kecil	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T15	Masih ada beberapa usaha mikro dan kecil masih berpola pikir konservatif dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T16	Adanya ketimpangan pendidikan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya	3,00	2,00	10,00	Sedang
M3T17	Adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia	3,00	1,00	4,00	Rendah
M3T18	Belum optimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri atau digitalisasi	1,00	1,00	1,00	Sangat Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.5 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 1)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Hasil penilaian risiko pada tujuan “Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia” misi 3 adalah Sedang, rendah dan sangat rendah. Dimana nilai risiko dengan kategori sedang mendapat nilai skala risiko 16 yaitu Belum optimalnya kualitas kontrol pelayanan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat (*humanity*) dan Belum optimalnya pelaksanaan kontrol manajemen Rumah Sakit. Sedangkan untuk kategori sedang dengan nilai skala risiko 14 yaitu Daya saing ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Pasuruan masih rendah. Kemudian risiko dengan kategori sedang yang memiliki nilai skala risiko 12 yaitu Kinerja sektor unggulan mengalami stagnasi sehingga pelaku usaha di sektor unggulan didominasi oleh usaha mikro dan kecil, Masih ada beberapa usaha mikro dan kecil masih berpola pikir



konservatif dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar. Terakhir untuk kategori sedang dengan nilai 10 yaitu Adanya ketimpangan pendidikan dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain itu ada risiko yang masuk dalam kategori rendah dengan nilai 4 yaitu Adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia dan kategori sangat rendah dengan nilai skala risiko 1 yaitu Belum optimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri atau digitalisasi.

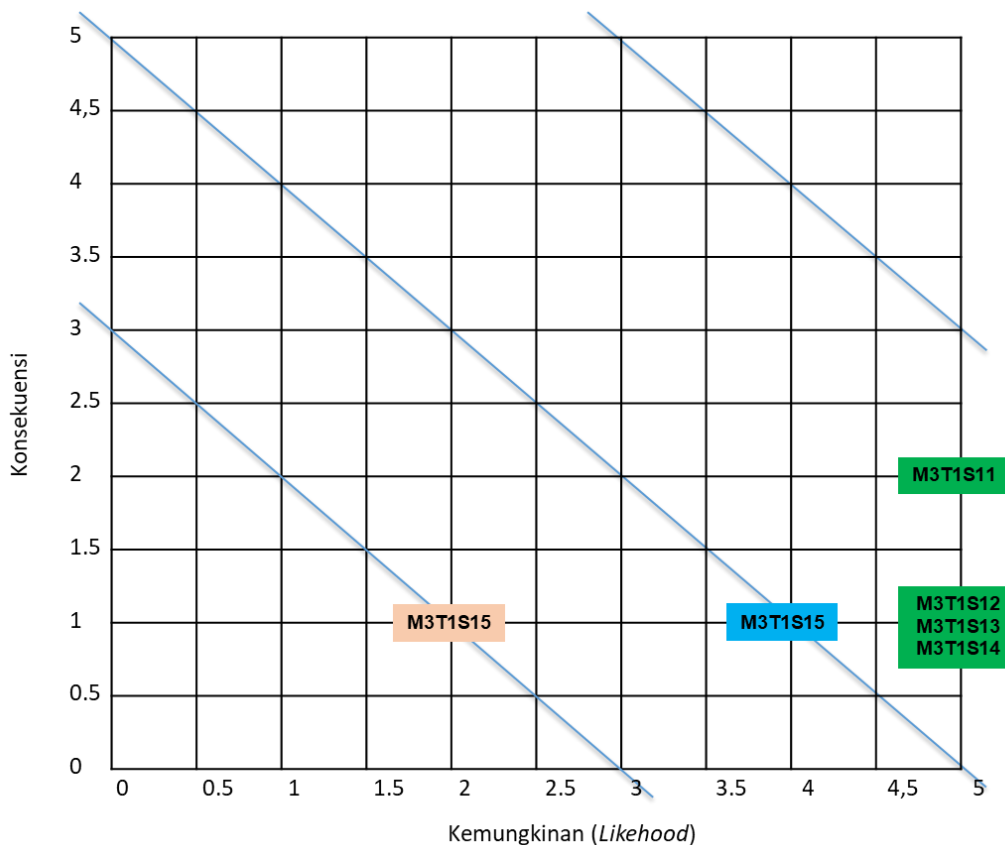
Tabel 4.15 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 1)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T1S11	Masih banyaknya guru honorer yang pendapatannya lebih rendah daripada buruh	5,00	2,00	16,00	Sedang
M3T1S12	Penurunan mutu/akreditasi dari sekolah karena adanya zonasi	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S13	Masih banyaknya guru senior yang belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S14	Masih ada masyarakat yang belum selesai menempuh pendidikan dalam jenjang tertentu untuk melanjutkan pendidikan	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S15	Belum meratanya pendaftaran pengajar ke setiap sekolah karena lebih memilih sekolah favorit	4,00	1,00	8,00	Rendah
M3T1S16	Belum optimalnya pengelolaan	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
	pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren)				

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.6 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 1)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Hasil penilaian risiko pada sasaran “Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Pendidikan” memiliki kategorisasi pengelompokan risiko dengan kategori sedang, rendah dan sangat rendah. Dimana risiko dengan risiko sedang memiliki nilai skala 16 yaitu Masih banyaknya guru honorer yang pendapatannya lebih rendah daripada buruh, serta nilai skala risiko 12 yaitu Penurunan mutu/akreditasi dari sekolah karena adanya zonasi, Masih banyaknya guru senior yang belum menggunakan teknologi

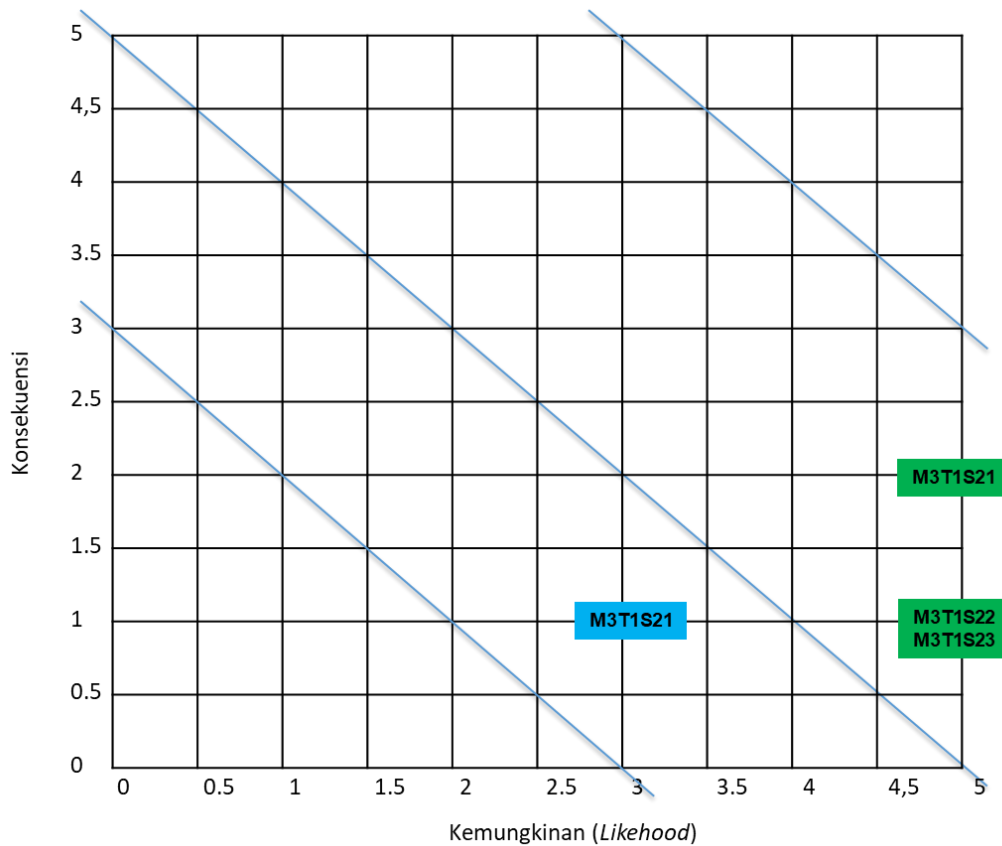


dalam proses pembelajaran, Masih ada masyarakat yang belum selesai menempuh pendidikan dalam jenjang tertentu untuk melanjutkan pendidikan. Untuk risiko dengan kategori rendah memiliki nilai skala 8 yaitu Belum meratanya pendaftaran pengajar ke setiap sekolah karena lebih memilih sekolah favorit. Terakhir untuk nilai skala risiko 2 dengan kategori risiko sangat rendah adalah Belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren).

Tabel 4.16 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T1S21	Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat	5,00	2,00	16,00	Sedang
M3T1S22	Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S23	Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta neonatal	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S24	Masih tingginya Angka Kematian Ibu	3,00	1,00	4,00	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.7 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

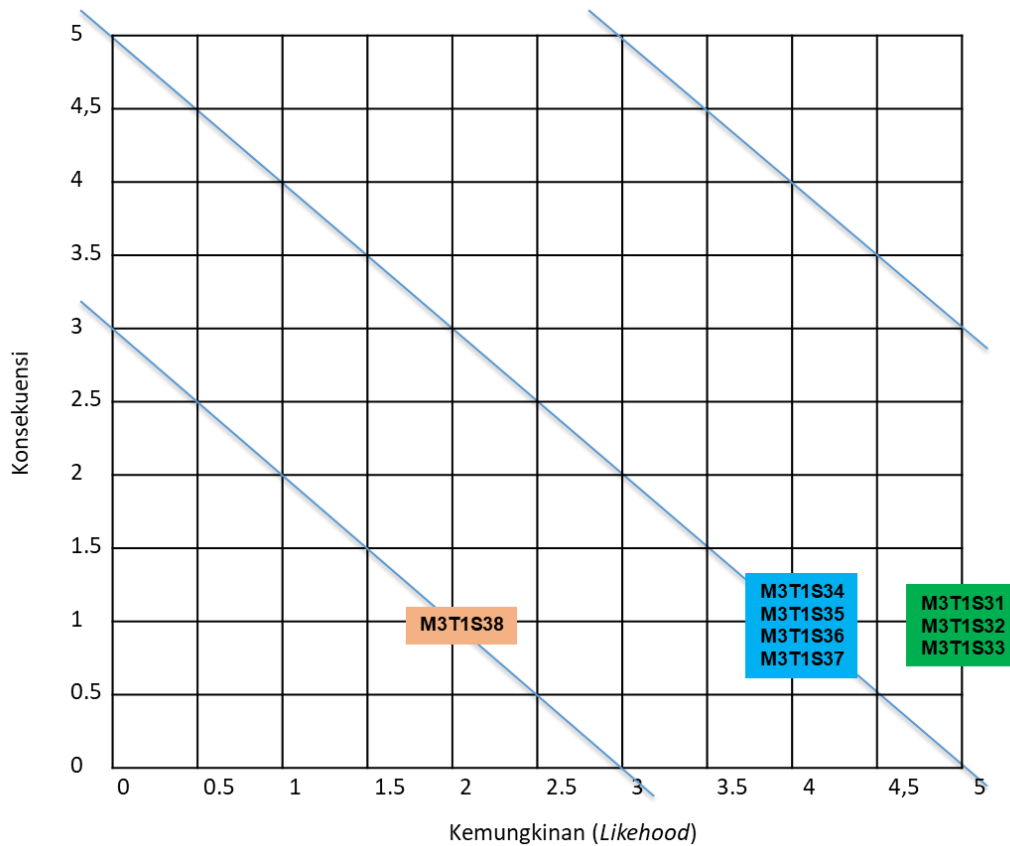
Hasil penilaian risiko pada sasaran “Meningkatnya Pemerataan Akses Dan Kualitas Kesehatan” mendapat kategorisasi skala risiko sedang dan rendah. Kategori sedang yaitu risiko dengan nilai 16 terkait dengan Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat, serta Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah dan Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta neonatal dengan nilai skala risiko 12. Untuk risiko yang masuk dalam hasil penilaian dengan kategori rendah yaitu masih tingginya Angka Kematian Ibu dengan nilai skala risiko 4.



Tabel 4.17 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 3)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T1S31	Adanya kredit yang banyak beredar di masyarakat	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S32	Adanya kenaikan suku bunga	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S33	Tidak terpenuhinya produk yang diinginkan masyarakat	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S34	Minimnya lapangan pekerjaan masyarakat	4,00	1,00	8,00	Rendah
M3T1S35	Adanya perubahan harga yang mengalami kenaikan	4,00	1,00	8,00	Rendah
M3T1S36	Adanya pengaruh inflasi	4,00	1,00	8,00	Rendah
M3T1S37	Adanya penurunan nilai tukar mata uang	4,00	1,00	8,00	Rendah
M3T1S38	Adanya peningkatan pajak	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.8 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 3)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

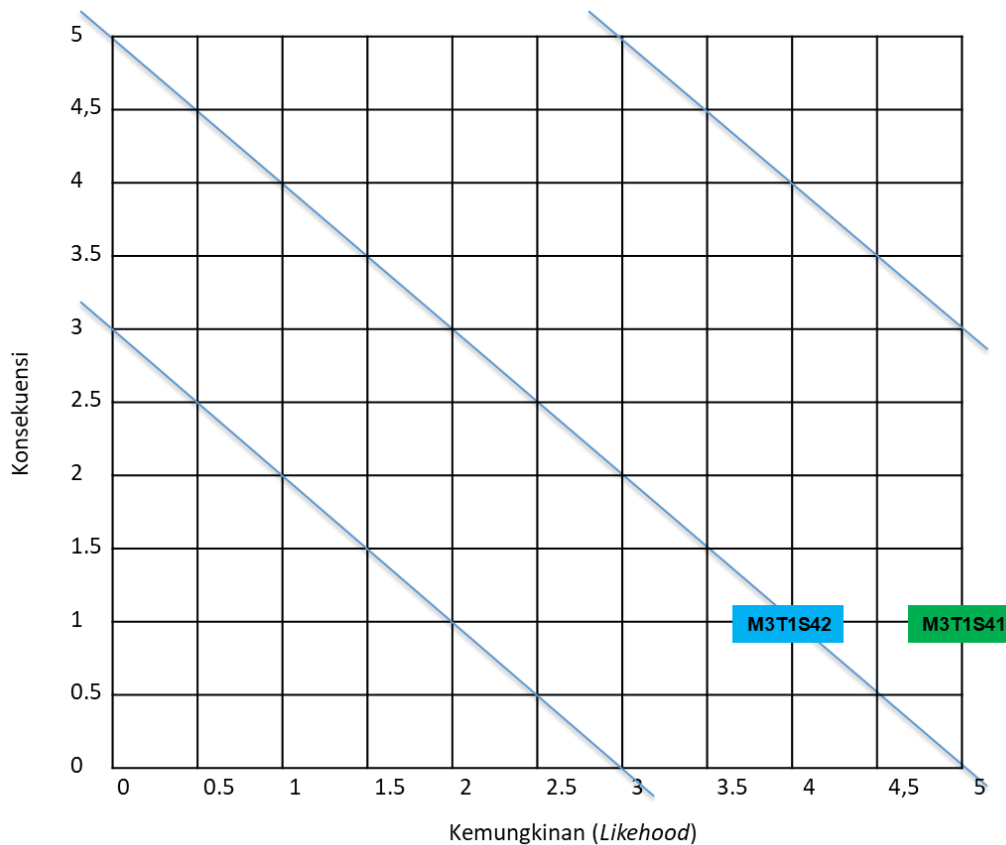
Hasil penilaian risiko pada sasaran “Meningkatnya Daya Beli Masyarakat” mendapat kategorisasi nilai Sedang, rendah, dan Sangat rendah. Untuk risiko dengan kategori sedang memiliki nilai skala risiko sebesar 12 yaitu Adanya kredit yang banyak beredar di masyarakat, Adanya kenaikan suku bunga, Tidak terpenuhinya produk yang diinginkan masyarakat. Risiko yang mendapat kategorisasi Rendah mendapat nilai skala risiko 8 yaitu Minimnya lapangan pekerjaan masyarakat, Adanya perubahan harga yang mengalami kenaikan, Adanya pengaruh inflasi, Adanya penurunan nilai tukar mata uang. Sedangkan untuk kategori sangat rendah dengan skala risiko 2 yaitu risiko Adanya peningkatan pajak.



Tabel 4.18 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 4)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T1S41	Pemahaman pembangunan gender di masyarakat masih rendah	5,00	1,00	12,00	Sedang
M3T1S42	Masih rendahnya pembangunan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan	4,00	1,00	8,00	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.9 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 4)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Sasaran “Meningkatnya Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan” pada misi empat mendapatkan hasil penilaian

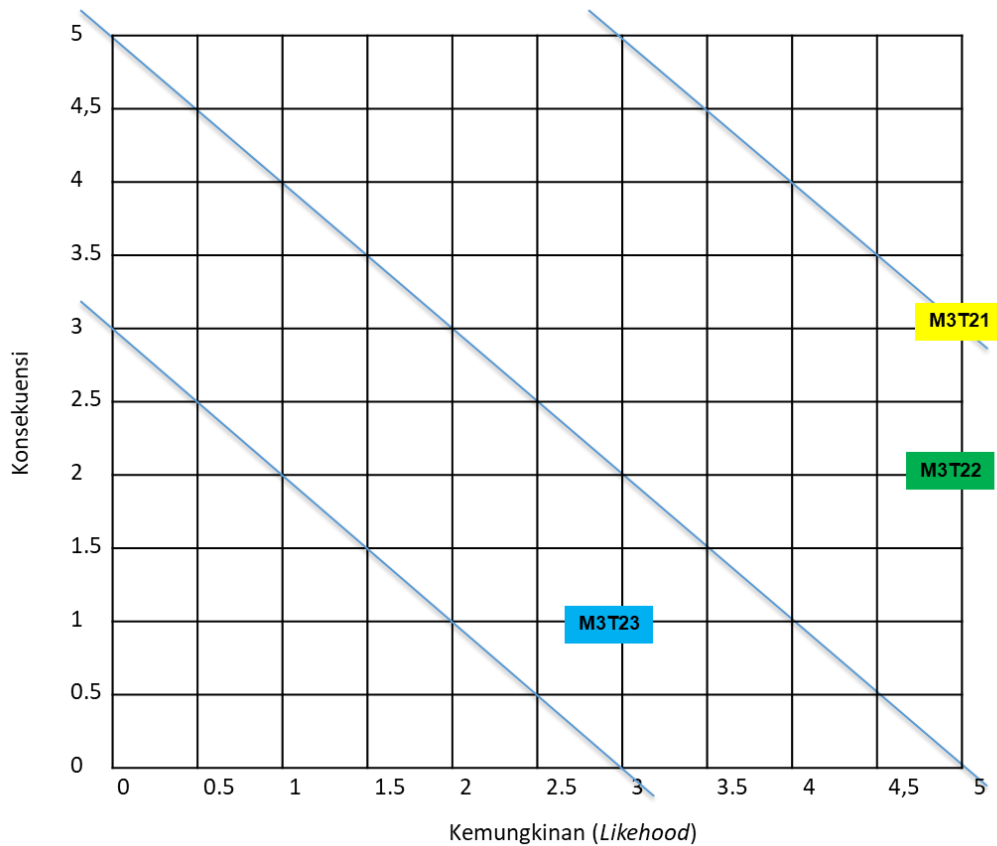


dengan kategori sedang dan rendah. Kategori rendah didapatkan dengan skala risiko 8 pada risiko Masih rendahnya pembangunan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kategori sedang dengan nilai skala risiko 12 pada risiko Pemahaman pembangunan gender di masyarakat masih rendah.

Tabel 4.19 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 2)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T21	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan negara yang rendah	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M3T22	Pelestarian lingkungan masih belum optimal	5,00	2,00	16,00	Sedang
M3T23	Adanya pengikisan etika dan budi pekerti	3,00	1,00	4,00	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.10 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Tujuan 2)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

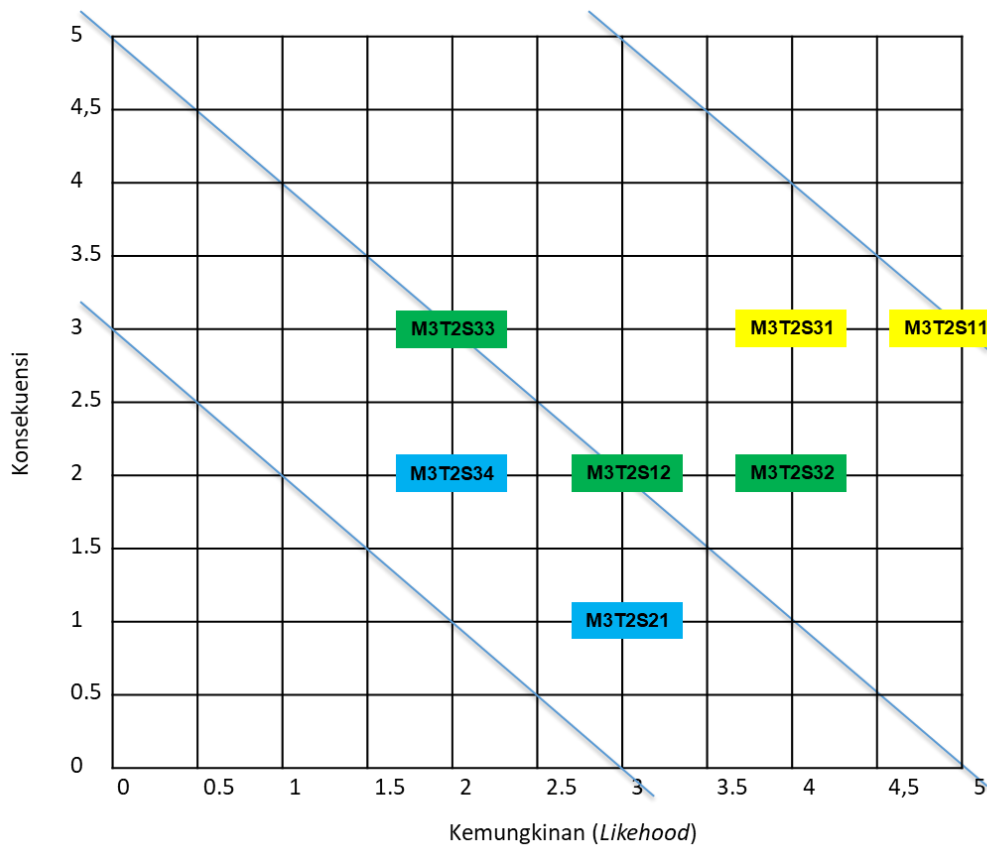
Hasil penilaian risiko pada tujuan 2 (2) “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis” misi 3 terdapat 3 (tiga) tingkatan kategorisasi risiko yaitu Tinggi, sedang, dan Rendah. Risiko dengan kategori rendah adalah Adanya pengikisan etika dan budi pekerti dimana dalam penilaian skala risiko yang didapatkan 4. Sedangkan untuk risiko dengan ketegori sedang yaitu Pelestarian lingkungan masih belum optimal dengan nilai skala risiko 16. Risiko dengan kategori Tinggi yaitu Tingkat kepatuhan terhadap peraturan negara yang rendah dengan nilai skala risiko 20.



Tabel 4.20 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M3T2S11	Tidak tersedianya Shelter atau Rumah Singgah	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M3T2S12	Banyaknya ruang publik yang berpotensi menjadi tempat PEKAT (Penyakit Masyarakat)	3,00	2,00	10,00	Sedang
M3T2S21	Potensi Hilangnya modal sosial dalam lingkungan Masyarakat	3,00	1,00	4,00	Rendah
M3T2S31	Potensi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba;	4,00	3,00	19,00	Tinggi
M3T2S32	Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan	4,00	2,00	14,00	Sedang
M3T2S33	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam rehabilitasi sosial;	2,00	3,00	9,00	Rendah
M3T2S34	Belum optimalnya upaya pemenuhan Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak	2,00	2,00	6,00	Tinggi

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.11 Peta Risiko Misi 3 RPJMD (Sasaran 2)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada sasaran “Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat” hasil penilaian risiko yang didapatkan menunjukkan beberapa kategorisasi nilai dari Tinggi, Sedang, dan Rendah. Pada kategori risiko tinggi terdapat pernyataan risiko Tidak tersedianya Shelter atau Rumah Singgah dengan nilai skala 20 dan Potensi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba dengan nilai skala 19. Sedangkan untuk pernyataan risiko yang masuk pada kategori risiko sedang yaitu Banyaknya ruang publik yang berpotensi menjadi tempat PEKAT (Penyakit Masyarakat) dengan nilai skala 10 dan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dengan nilai skala risiko 14. Sedangkan untuk risiko dengan kategori rendah

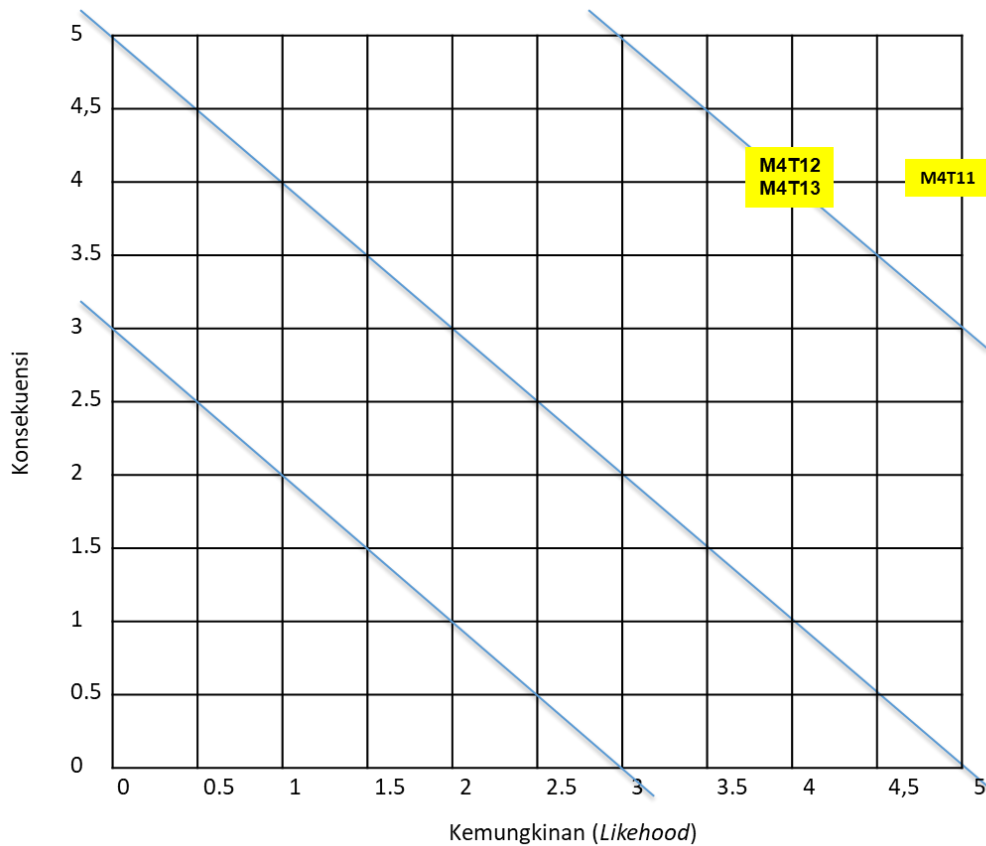


mendukung dalam rehabilitasi sosial memiliki nilai 6 dan Banyaknya ruang publik yang berpotensi menjadi tempat PEKAT (Penyakit Masyarakat) nilai 4.

Tabel 4.21 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Tujuan)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M4T11	Perlunya <i>maintenance</i> ke kebijakan (perencanaan, monev dan kekurangan anggaran)	4,00	5,00	23,00	Tinggi
M4T12	Faktor pendukung yang kurang memadai (sarana dan prasarana)	4,00	4,00	22,00	Tinggi
M4T13	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan mengacu nilai Indeks Reformasi Birokrasi	4,00	4,00	22,00	Tinggi

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.12 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Tujuan)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Hasil penilaian risiko tujuan “Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi” memiliki kategorisasi risiko tinggi, sedang, dan rendah. Risiko dengan hasil nilai skala risiko 22 yaitu Perlunya pendidikan non formal untuk meningkatkan Kompetensi. Nilai skala risiko 20 yaitu Monev dan evaluasi yang tidak berjalan, dan nilai skala risiko 18 yaitu Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah masuk dalam kategorisasi risiko tinggi. Sedangkan untuk risiko terkait dengan Kebijakan kepegawaian pemerintah (Rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi) yang tidak tepat sasaran, Perlunya penatausahaan keuangan daerah, Adanya temuan berulang dalam tingkat OPD memiliki nilai risiko 15 yang masuk dalam kategorisasi risiko sedang. Risiko Temuan yang materil (temuan yang mempengaruhi keseluruhan opini BPK dan Komitmen pimpinan yang dapat



mempengaruhi kinerja OPD memiliki nilai skala risiko 11 masuk pada kategori sedang. Terakhir untuk kategori risiko rendah yaitu Kurangnya pendidikan formal ASN dengan nilai skala risiko 9 dan Evaluasi kebijakan tidak berjalan dengan nilai skala risiko 5.

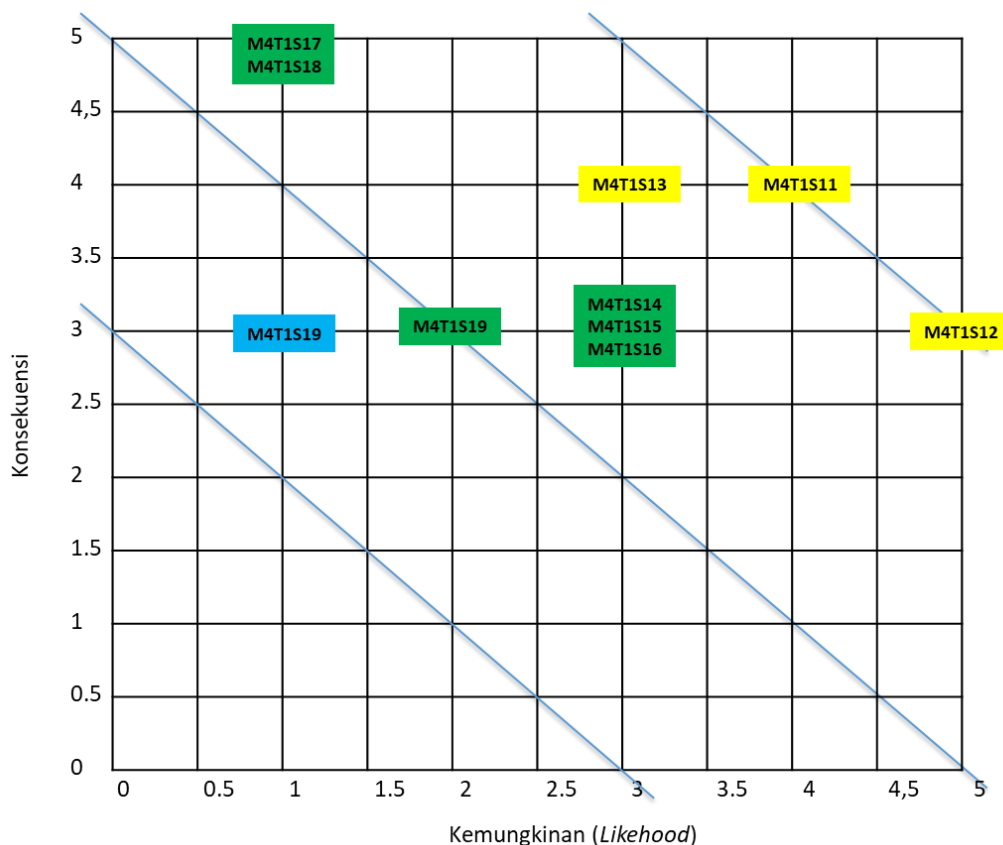
Tabel 4.22 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M4T1S11	Perlunya pendidikan non formal untuk meningkatkan Kompetensi	4,00	4,00	22,00	Tinggi
M4T1S12	Monev dan evaluasi yang tidak berjalan	5,00	3,00	20,00	Tinggi
M4T1S13	Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah	3,00	4,00	18,00	Tinggi
M4T1S14	Kebijakan kepegawaian pemerintah (Rekrutmen, rotasi, pendidikan, promosi) yang tidak tepat sasaran	3,00	3,00	15,00	Sedang
M4T1S15	Perlunya penatausahaan keuangan daerah	3,00	3,00	15,00	Sedang
M4T1S16	Adanya temuan berulang dalam tingkat OPD	3,00	3,00	15,00	Sedang
M4T1S17	Temuan yang materiil (temuan yang mempengaruhi keseluruhan opini BPK)	1,00	5,00	11,00	Sedang
M4T1S18	Komitmen pimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja OPD	1,00	5,00	11,00	Sedang
M4T1S19	Kurangnya pendidikan	2,00	3,00	9,00	Sedang



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
	formal ASN				
M4T1S110	Evaluasi kebijakan tidak berjalan	1,00	3,00	5,00	Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.13 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Hasil penilaian risiko sasaran “Membangun Kapasitas Manajemen Pemerintahan yang Adaptif dan Profesional” menunjukkan kategorisasi nilai risiko pada tujuan ini tergolong tinggi. Dimana nilai skala risiko tertinggi yaitu 30 dengan pernyataan risiko Perlunya *maintenance* kebijakan (perencanaan, monev dan kekurangan anggaran). Di posisi kategori tinggi yang kedua yaitu Faktor pendukung yang kurang memadai (sarana dan

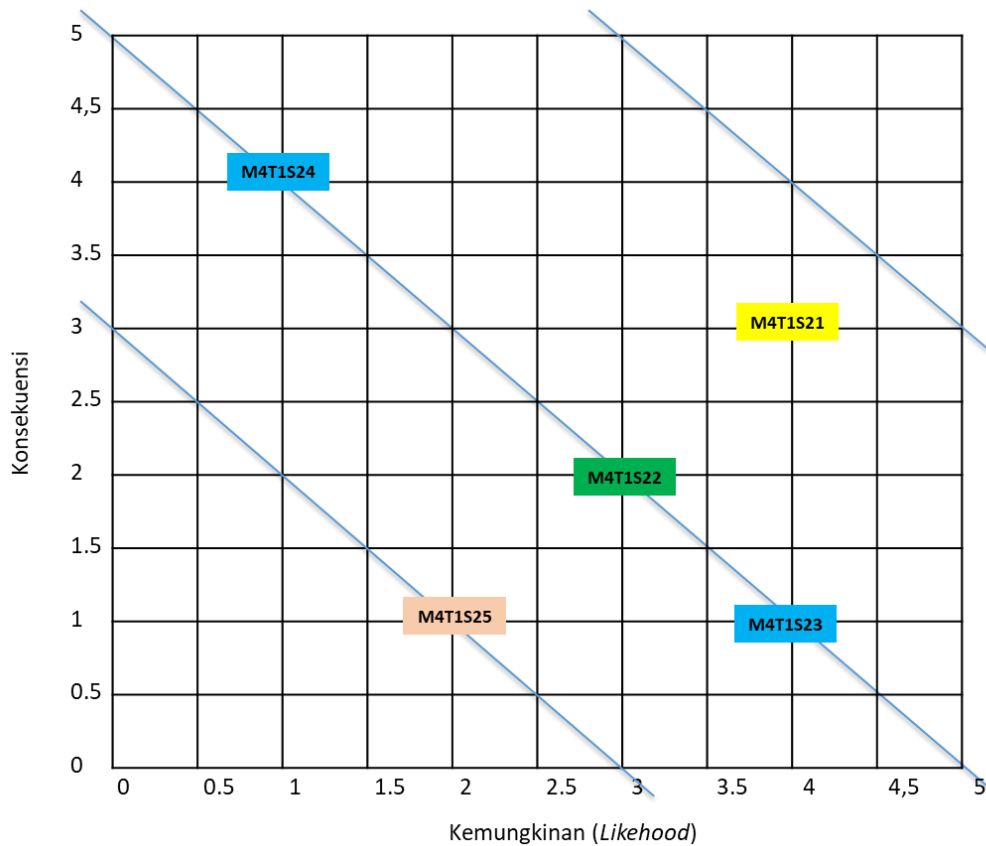


prasarana) dan Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan mengacu nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai skala risiko 22.

Tabel 4.23 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran)

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dampak	Skala Risiko	Kategori
1	2	3	4	5	6
M4T1S21	Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	4,00	3,00	19,00	Tinggi
M4T1S22	Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (terkait pelayanan prima) dalam teknologi serta anggaran yang tidak disetujui	3,00	2,00	10,00	Sedang
M4T1S23	Tidak adanya tracing sistem dalam pelayanan dan pengaduan (atas tindak lanjut pengaduan) terkait progres maupun hasil	4,00	1,00	8,00	Rendah
M4T1S24	Tidak ada evaluasi dari OPD yang tidak bertanggungjawab langsung kepada kementerian	3,00	1,00	4,00	Rendah
M4T1S25	Hasil evaluasi IKM tidak ditindaklanjuti	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023



Gambar 4.14 Peta Risiko Misi 4 RPJMD (Sasaran)

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Hasil penilaian risiko sasaran “Integrasi Digitalisasi pada Pelayanan Publik” menunjukkan adanya risiko dengan kategorisasi Tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Risiko dengan Kategori tinggi memiliki skala 19 yaitu risiko terkait dengan nilai Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kategori risiko sedang Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (terkait pelayanan prima) dalam teknologi serta anggaran yang tidak disetujui memiliki nilai skala risiko 10. Sedangkan untuk risiko dengan kategori rendah yaitu Tidak adanya tracing sistem dalam pelayanan dan pengaduan (atas tindak lanjut pengaduan) terkait progres maupun hasil dan Tidak ada evaluasi dari OPD yang tidak bertanggungjawab langsung kepada kementerian. Sementara pada kategori risiko sangat



rendah dengan skala nilai 2 yaitu Hasil evaluasi IKM tidak ditindaklanjuti.



BAB V
RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN





BAB V

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Rencana tindak pengendalian (RTP) adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah. Bagian ini berisi langkah-langkah konkret dan terstruktur yang dirancang untuk mengatasi sebuah resiko atau situasi yang memerlukan intervensi. Pertama, resiko yang teridentifikasi diidentifikasi dengan jelas, termasuk sumber resiko, kemungkinan terjadinya, dan dampaknya. Selanjutnya, tindakan konkret untuk mengendalikan resiko tersebut ditetapkan. Ini mungkin termasuk langkah-langkah pencegahan, mitigasi, transfer resiko, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan situasi yang dihadapi.

RTP memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen resiko suatu organisasi. Rencana ini adalah sebuah dokumen yang merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola resiko yang diidentifikasi. Tujuan utama dari rencana tindak pengendalian resiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari resiko dan meningkatkan kinerja, keselamatan, keamanan, serta kinerja organisasi.

Bagian ini juga berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi rencana, dan juga sebagai alat komunikasi untuk menjelaskan tujuan, langkah-langkah, dan harapan dari tindakan pengendalian yang akan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa ada akuntabilitas yang jelas dalam menjalankan rencana tersebut. Selain itu, rencana ini juga mencakup jadwal pelaksanaan dan pemantauan, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan pengendalian resiko dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.



Dengan adanya rencana tindak pengendalian yang terstruktur, organisasi atau individu dapat mengelola masalah dengan lebih efektif, mengurangi risiko, dan mencapai perbaikan berkelanjutan. Dalam penyusunan RTP, harus diperhatikan beberapa hal seperti sebagai berikut:

- A. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian
- B. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko
- C. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian
- D. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi
- E. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP

Manfaat utama dari rencana tindak pengendalian risiko adalah sebagai alat yang membantu organisasi menghadapi risiko dengan lebih baik. Dengan adanya rencana ini, organisasi dapat mengantisipasi dan merespons risiko dengan lebih terarah dan terstruktur. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan keputusan yang diambil dalam menghadapi risiko.

Selain itu, rencana tindak pengendalian risiko juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal, seperti pemangku kepentingan, investor, atau penerima dampak/layanan. Dengan menunjukkan bahwa organisasi memiliki rencana yang komprehensif untuk mengelola risiko, hal ini dapat meningkatkan citra organisasi dan memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa risiko telah diidentifikasi dan ditangani secara profesional.

Secara keseluruhan, rencana tindak pengendalian risiko adalah instrumen penting dalam manajemen risiko organisasi. Melalui rencana ini, organisasi dapat mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko dengan lebih efektif, meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kinerja secara



keseluruhan, serta membangun kepercayaan dari pihak eksternal.

Proses implementasi rencana tindak pengendalian resiko meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/ atau prosedur, dan
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Berikut hasil identifikasi dan perumusan rencana tindak pengendalian risiko pemerintah Kota Pasuruan:

Misi I “Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan”

Tabel 5.24 Rencana Tindak Pengendalian Misi I

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M1T11	Tidak sesuai nya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan <i>high-skilled labour</i>	Pelatihan Tenaga Kerja		Disnaker Disperindag	
M1T12	Jangkauan distribusi hasil produksi UMKM masih terbatas				
M1T13	Rendahnya pemanfaatan teknologi untuk menunjang produktivitas industri				
M1T14	Rendahnya tingkat pendapatan daerah				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
M1T1S1 1	Keterbatasan akses terhadap modal				
M1T1S1 2	Angka TPT yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir				
M1T1S1 3	Ketidaksesuaian data kemiskinan yang ada di lapangan				
M1T1S2 1	Potensi pendapatan yang masih belum dikelola maksimal				
M1T1S2 2	Kemampuan pengelolaan keuangan yang belum optimal				

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor penunjang pendapatan asli daerah terdapat beberapa risiko yang muncul dalam proses pelaksanaannya, antara lain yaitu ketidaksesuaiannya keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri yang membutuhkan *high-skilled labour*. Maka dari itu, salah satu rencana tindak pengendaliannya yaitu dengan diadakannya pelatihan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.



Misi II: Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan.

Tabel 5.25 Rencana Tindak Pengendalian Misi II

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M2T11	Belum optimalnya peningkatan konektivitas dan mobilitas orang dan barang yang di dukung oleh sistem transportasi cerdas				
M2T12	Masih minimnya peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dalam kondisi baik dan laik fungsi				
M2T13	Belum optimalnya penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan nyaman				
M2T14	Keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, untuk itu diperlukan upaya alternatif dalam penyediaan sumber pendanaan non APBD				
M2T15	Terjadinya bencana yang belum termitigasi dengan baik				
M2T1S1 1	Masih terjadi kekurangan investasi di sektor pembangunan				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	infrastruktur				
M2T1S1 2	Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan				
M2T1S2 1	Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan				
M2T1S2 2	Penurunan komponen lingkungan pada perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana				

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Misi III : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata

Tabel 5.26 Rencana Tindak Pengendalian Misi III

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M3T12	Daya saing ekonomi dibandingkan dengan daerah lain di sekitar Kota Pasuruan masih rendah				
M3T13	Kinerja sektor unggulan mengalami stagnasi sehingga pelaku usaha di sektor unggulan didominasi oleh usaha mikro dan kecil				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindakan Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M3T14	Masih ada beberapa usaha mikro dan kecil masih berpola pikir konservatif dengan kecenderungan menjiplak produk pesaingnya yang laku di pasar				
M3T15	Adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia				
M3T16	Belum optimalnya kualitas kontrol pelayanan dari tenaga kesehatan kepada masyarakat (humanity)				
M3T17	Belum optimalnya pelaksanaan kontrol manajemen Rumah Sakit				
M3T18	Belum optimalnya sumber daya manusia dalam menghadapi revolusi industri atau digitalisasi				
M3T1S1 1	Masih ada masyarakat yang belum selesai menempuh pendidikan dalam jenjang tertentu untuk melanjutkan pendidikan				
M3T1S1 2	Belum optimalnya pengelolaan pendidikan non formal (Diniyah dan Pesantren)				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindakan Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M3T1S1 3	Masih banyaknya guru senior yang belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran				
M3T1S1 4	Masih banyaknya guru honorer yang pendapatannya lebih rendah daripada buruh				
M3T1S1 5	Belum meratanya pendaftaran pengajar ke setiap sekolah karena lebih memilih sekolah favorit				
M3T1S1 6	Penurunan mutu/akreditasi dari sekolah karena adanya zonasi				
M3T1S2 1	Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta neonatal				
M3T1S2 2	Masih tingginya Angka Kematian Ibu				
M3T1S2 3	Belum optimalnya budaya kerja tenaga kesehatan kepada masyarakat				
M3T1S2 4	Pola perilaku masyarakat terhadap kesehatan masih rendah				
M3T1S3 1	Adanya perubahan harga yang mengalami kenaikan				
M3T1S3 2	Adanya pengaruh inflasi				
M3T1S3 3	Adanya penurunan nilai tukar mata				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	uang				
M3T1S3 4	Adanya peningkatan pajak				
M3T1S3 5	Minimnya lapangan pekerjaan masyarakat				
M3T1S3 6	Adanya kredit yang banyak beredar di masyarakat				
M3T1S3 7	Adanya kenaikan suku bunga				
M3T1S3 8	Tidak terpenuhinya produk yang diinginkan masyarakat				
M3T1S4 1	Masih rendahnya pembangunan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan				
M3T1S4 2	Pemahaman pembangunan gender di masyarakat masih rendah				
M.3.T.2. 1	Adanya pengikisan etika dan budi pekerti				
M.3.T.2. 2	Pelestarian lingkungan masih belum optimal				
M.3.T.2. 3	Tingkat kepatuhan terhadap peraturan negara yang rendah				
M.3.T.2. S.1.1	Banyaknya ruang publik yang berpotensi menjadi tempat PEKAT (Penyakit Masyarakat)				
M.3.T.2. S.1.2	Tidak tersedianya Shelter atau Rumah Singgah				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M.3.T.2. S.2.1	Potensi Hilangnya modal sosial dalam lingkungan Masyarakat				
M.3.T.2. S.3.1	Kurangnya sarana prasarana yang mendukung dalam rehabilitasi sosial;				
M.3.T.2. S.3.2	Potensi kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba;				
M.3.T.2. S.3.3	Belum optimalnya upaya pemenuhan Jaminan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Perempuan dan Anak				
M.3.T.2. S.3.4	Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak belum menjadi dasar/prioritas pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan				

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Misi IV : Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif



Tabel 5.27 Rencana Tindak Pengendalian Misi IV

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M.4.T.1.1	Perlunya <i>maintenanc</i> e kebijakan (perencanaan, monev dan kekurangan anggaran) atau adanya perubahan kebijakan	Penyusunan dan penetapan Perwali sebagai kebijakan dalam pemberian fasilitasi insentif dan kemudahan berusaha			Pengajuan dari DPMP TSP
M.4.T.1.2	Faktor pendukung yang kurang memadai (sarana dan prasarana)	Pengajuan anggaran Pengadaan Sarana Prasana pelayanan		DISKOMI NFO	Pengajuan dari DPMP TSP
M.4.T.1.3	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dengan mengacu				
M.4.T.1.S.1.1	Perlunya pendidikan non formal untuk meningkatkan Kompetensi				
M.4.T.1.S.1.2	Monev dan evaluasi yang tidak berjalan				
M.4.T.1.S.1.3	Kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah				
M.4.T.1.S.1.4	Kebijakan kepegawaian pemerintah (Rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi) yang tidak tepat sasaran				
M.4.T.1.S.1.5	Perlunya penatausahaan keuangan daerah				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M.4.T.1. S.1.6	Adanya temuan berulang dalam tingkat OPD				
M.4.T.1. S.1.7	Temuan yang materiil (temuan yang mempengaruhi keseluruhan opini BPK)				
M.4.T.1. S.1.8	Komitmen pimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja OPD				
M.4.T.1. S.1.9	Kurangnya pendidikan formal ASN				
M.4.T.1. S.1.10	Evaluasi kebijakan tidak berjalan				
M.4.T.1. S.1.11	Masih banyak ASN yang kurang peduli terhadap kemajuan teknologi untuk peningkatan kinerja				
M.4.T.1. S.2.1	Belum optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)				
M.4.T.1. S.2.2	Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (terkait pelayanan prima) dalam teknologi serta anggaran yang tidak disetujui				
M.4.T.1. S.2.3	Tidak adanya tracing sistem dalam pelayanan dan pengaduan (atas tindak lanjut pengaduan) terkait progres maupun hasil				



Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
M.4.T.1. S.2.4	Tidak ada evaluasi dari OPD yang tidak bertanggungjawab langsung kepada kementerian				
M.4.T.1. S.2.5	Hasil evaluasi IKM tidak ditindaklanjuti				

Sumber: Diolah oleh Penyusun, 2023

Pada pelaksanaan transformasi layanan publik yang mudah dan cepat melalui digitalisasi manajemen dan birokrasi yang adaptif tidak lepas dari risiko yang menyertainya didalam prosesnya, risiko yang ada yaitu adanya perubahan kebijakan sehingga diperlukannya evaluasi kebijakan. Kemudian dari risiko tersebut salah satu rencana tindak pengendaliannya adalah penyusunan dan penetapan Perwali sebagai kebijakan dalam pemberian fasilitasi insentif dan kemudahan berusaha khususnya pada DPMPTSP. Selain itu kurang memadainya faktor pendukung (terkait sarana dan prasarana) sehingga untuk rencana tindak pengendaliannya yaitu pengajuan anggaran pengadaan sarana prasana pelayanan.



BAB VI PENUTUP





BAB VI

PENUTUP

Penting bagi sebuah organisasi atau individu untuk memahami bahwa manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang krusial untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam operasional atau pengambilan keputusan. Dalam mengelola risiko, upaya proaktif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.

Dengan adanya manajemen risiko yang efektif, organisasi atau individu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian, melindungi kepentingan dan aset yang berharga, serta meningkatkan peluang kesuksesan. Manajemen risiko juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, berdasarkan analisis yang cermat terhadap potensi risiko dan dampaknya.

Namun, penting untuk diingat bahwa manajemen risiko bukanlah tugas yang sekali jalan. Lingkungan bisnis dan kondisi eksternal terus berubah, sehingga risiko-risiko baru dapat muncul. Oleh karena itu, manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan yang berkesinambungan.

Dalam penutup ini, perlu juga disampaikan bahwa manajemen risiko bukanlah jaminan untuk menghindari setiap risiko sepenuhnya, tetapi merupakan suatu upaya untuk mengelola risiko secara efektif dan responsif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder, organisasi atau individu dapat meningkatkan daya tanggap terhadap risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai keberhasilan jangka panjang.



**PEMERINTAH
KOTA PASURUAN**

